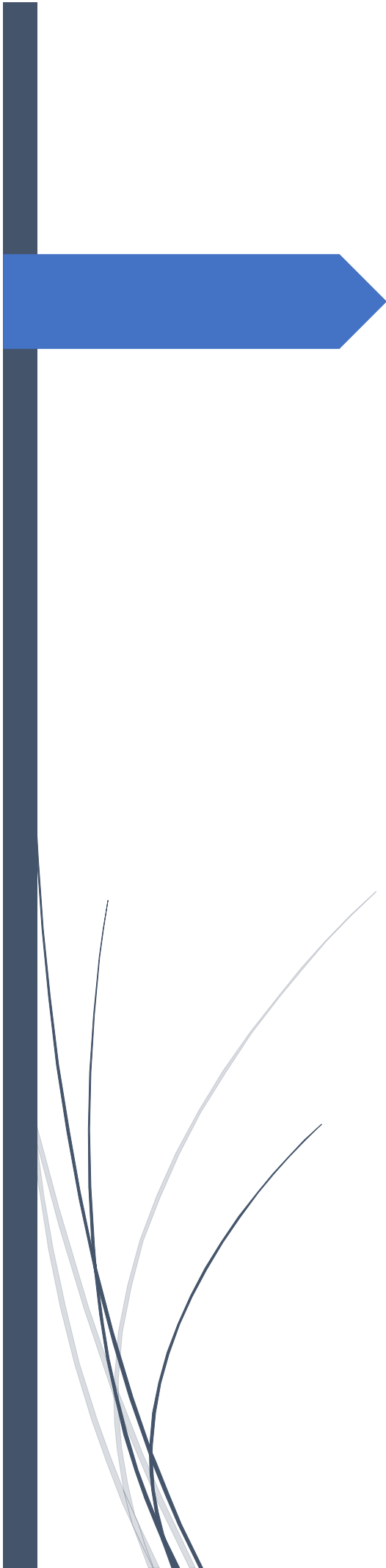




Rencana Strategis Direktorat Pasifik dan Oseania 2025-2029

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pasifik dan Oseania tahun 2025 – 2029 merupakan pengejawantahan dari komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pasifik dan Oseania selama lima tahun ke depan, memastikan roda diplomasi dan kerja sama internasional berjalan selaras untuk mencapai tujuan Asta Cita.

Renstra ini dirancang untuk secara spesifik mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam memantapkan ketangguhan diplomasi serta kontribusi aktif Indonesia pada tata kelola global.

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri, dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika tahun 2025 – 2029, Direktorat Pasifik dan Oseania berkomitmen untuk mencapai visi: “Memantapkan ketangguhan diplomasi Indonesia dalam memperkuat hubungan internasional yang kondusif di kawasan Pasifik dan Oseania, serta berkontribusi pada tata kelola global yang mendukung pembangunan nasional, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.”

Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Kami berharap dokumen ini tidak hanya menjadi landasan perencanaan dan pelaksanaan program kerja, tetapi juga instrumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berpegang teguh pada visi ini, semua kegiatan diplomasi akan diimplementasikan sebaik-baiknya demi peningkatan peran aktif dan kepentingan nasional Indonesia di kawasan Pasifik dan Oseania.

Jakarta, 15 Januari 2026
Direktur Pasifik dan Oseania



Adi Dzulfuat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	2
1.2.1. Potensi	2
1.2.2. Permasalahan dan Tantangan	6
1.2.3. Analisis SWOT dan Mitigasi Risiko.....	10
1.3. Capaian Rencana Strategis Direktorat Pasifik dan Oseania tahun 2020-2024	13
Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh di Tingkat Regional dan Global	14
Diplomasi Ekonomi di Kawasan Pasifik dan Oseania.....	15
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.....	24
2.1 Visi Direktorat Pasifik dan Oseania.....	24
2.2 Misi Direktorat Pasifik dan Oseania.....	24
2.3 Tujuan Direktorat Pasifik dan Oseania.....	26
2.4 Sasaran Program Direktorat Pasifik dan Oseania.....	28
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	35
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Luar Negeri.....	35
3.1.1 Arah Kebijakan Kementerian Luar Negeri	38
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 39	
3.2.1 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	39
3.2.2 Strategi Kebijakan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika.....	40
3.2.3 Strategi Kebijakan Direktorat Pasifik dan Oseania	43
3.3 Mitigasi Risiko.....	45
3.4 Kerangka Regulasi	50
3.5 Kerangka Kelembagaan	51
3.5.1 Peran Strategis Direktorat Pasifik dan Oseania	52
3.5.2 Fungsi Direktorat Pasifik dan Oseania.....	52
3.5.3 Struktur Organisasi Direktorat Pasifik dan Oseania.....	53

3.5.4	Evaluasi Kelembagaan dan Penyederhanaan Birokrasi	53
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT		
	ORGANISASI.....	54
4.1	Target Kinerja.....	54
4.2	Kerangka Pendanaan	55
BAB V PENUTUP		58
LAMPIRAN		59
Lampiran 1: Matriks Strategi Direktorat Pasifik dan Oseania tahun 2025-2029		59
Lampiran 2: Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Pasifik dan Oseania 2025-2029		65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikasi Risiko Sasaran Program Direktorat Pasifik dan Oseania 2025-2029	31
Tabel 2. Daftar Mitigasi Risiko Direktorat Pasifik dan Oseania	45
Tabel 3. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Direktorat Pasifik dan Oseania Periode 2025-2029.....	54
Tabel 4. Proyeksi Kebutuhan Anggaran Direktorat Pasifik dan Oseania Periode 2025-2029	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Format Analisis SWOT	10
--------------------------------------	----

BAB I | PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Situasi di kawasan Pasifik berkembang sangat dinamis di tengah berlangsungnya perebutan pengaruh (*rivalitas*) di kawasan antar kekuatan-kekuatan besar dunia (*major powers*). Di satu sisi, perebutan pengaruh di kawasan ini berdampak pada menguatnya posisi tawar yang lebih tinggi dari negara-negara kepulauan di Pasifik terkait bantuan luar negeri baik bersifat teknis maupun finansial dari mitra-mitra tradisionalnya. Namun di sisi lain, proyeksi kekuatan (*power projection*) ini juga akan memperkuat postur diplomasi/ kekuatan *major powers* di kawasan. Hal ini tentu saja turut mempengaruhi pola hubungan antar negara-negara di kawasan, termasuk dengan Indonesia.

Sebagai langkah Pemerintah RI untuk menghadapi situasi di kawasan Pasifik, pada tahun 2021 telah dilaksanakan perubahan organisasi pada Ditjen Aspasaf Kementerian Luar Negeri dengan memekarkan Direktorat Asia Timur dan Pasifik menjadi Direktorat Asia Timur dan Direktorat Pasifik dan Oseania. Pembentukan Direktorat Pasifik dan Oseania juga merupakan salah satu dari implementasi visi Pacific Elevation tahun 2019 yang menegaskan komitmen Indonesia untuk meningkatkan profil, peran dan kontribusinya melalui kerja sama dengan negara-negara Pasifik.

Dengan adanya Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 6 Tahun 2021, Direktorat Pasifik dan Oseania resmi beroperasi sejak awal tahun 2022. Pembentukan Dit. Pasifik dan Oseania merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan fokus diplomasi di kawasan Pasifik dan Oseania. Kawasan ini dipandang esensial dalam upaya diplomasi Indonesia, termasuk dalam konteks memagari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di berbagai forum bilateral dan regional. Upaya ini dilakukan di tengah dinamika geopolitik persaingan kekuatan besar dunia yang semakin intensif di kawasan tersebut.

Dalam periode Rencana Strategis Ditjen Aspasaf tahun 2020–2024 dan Dit. Pasifik dan Oseania tahun 2022-2024, Dit. Pasifik dan Oseania berupaya mewujudkan misinya yang mencakup penyediaan nilai manfaat ekonomi yang optimal, memajukan kepemimpinan Indonesia yang berpengaruh, dan meningkatkan infrastruktur diplomasi di kawasan ini. Secara fungsional, Dit. Pasifik dan Oseania mengampu dua komponen kinerja utama, yaitu kerja sama bilateral dan forum regional.

Negara-negara yang tercakup dalam ranah tugas Dit Pasifik dan Oseania meliputi Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji,

Kaledonia Baru, Palau, Kepulauan Marshall, Federasi Mikronesia, Kiribati, Tuvalu, Nauru, Samoa, Tonga, Kepulauan Cook, Niue, Polinesia Prancis, sedangkan organisasi-organisasi regional yang tercakup adalah Melanesian Spearhead Group (MSG), Pacific Islands Forum (PIF) dan Organization of African, Caribbean and Pacific States (OACPS).

1.2. Potensi dan Permasalahan

Merujuk RPJPN 2025 – 2045, terdapat sepuluh megatrend global yang diperkirakan memunculkan sejumlah potensi kemajuan dan disrupsi yang perlu diantisipasi. Sepuluh megatrend global tersebut mencakup perkembangan demografi global, geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi, peningkatan urbanisasi global, konstelasi perdagangan global, tata kelola keuangan global, pertumbuhan *middle class*, peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, perubahan iklim dan pemanfaatan luar angkasa.¹

Perkembangan pesat teknologi digital dan komputasi, terutama kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) akan semakin memicu perubahan transformatif yang berskala global, berjangka panjang dan bersifat sangat masif. Pandemi COVID-19 yang terjadi di periode 2020 – 2022 juga berkontribusi pada perubahan pola kehidupan di berbagai sektor, khususnya sosial dan ekonomi.

1.2.1. Potensi

Pertumbuhan Ekonomi dan Kondisi Makroekonomi Kondusif

Momentum pemulihan perekonomian nasional terus terjaga khususnya berkat permintaan dalam negeri yang kuat. Pada kuartal I 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,11% (y-o-y), setara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebelum masa pandemi COVID-19. Tingkat inflasi per April 2024 sebesar 3,0% (y-o-y), masih dalam kisaran target nasional, yakni $2,5\% \pm 1\%$ ². Indonesia mendapatkan rekognisi sebagai *full investment grade country* dari tiga lembaga pemeringkat internasional utama, dengan rating BBB/Stabil(Fitch), Baa2/Stabil (Moody's) dan BBB/Stabil (S& P Global) di tahun 2023 – 2024.

Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar ke-16 di dunia dan terbesar di ASEAN. Indonesia juga tercatat sebagai satu-satunya negara anggota ASEAN yang menjadi anggota G20, dengan PDB sebesar USD 1,2 triliun di tahun 2022. Dengan ini, Indonesia diprediksi menjadi ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada 2045³.

¹ Lampiran Permenlu No. 10/2025 Tentang Renstra Kemenlu Tahun 2025 – 2029

² Lampiran I PP No. 12/2025 tentang RPJMN tahun 2025 – 2029

³ *Op.cit*

Pertumbuhan ekonomi positif tersebut juga didukung dengan kinerja positif pembangunan infrastruktur nasional, khususnya untuk mendukung konektivitas, kelistrikan, teknologi informasi dan komunikasi, waduk dan saluran irigasi, serta sarana prasarana dasar. Kondisi ini juga ditopang dengan ketersediaan sumber daya alam yang besar dan beragam, khususnya cadangan nikel, timah, bauksit dan tembaga, potensi Energi Baru Terbarukan, maupun potensi produksi perikanan serta pertanian.

Peningkatan investasi di sektor-sektor terkait dan perluasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang semakin terintegrasi dalam ekosistem halal akan semakin mendorong meluasnya kontribusi industri halal ke perekonomian Indonesia. Dengan fokus pada standarisasi dan sertifikasi produk, industri halal tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi domestik tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk nasional, surplus perdagangan dari ekspor produk halal, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Sumber Daya Alam dan Manusia Memadai

Indonesia memiliki populasi sumber daya manusia (SDM) terbesar ke-4 di dunia, dengan usia median 29 tahun. Sejumlah indikator Kualitas SDM nasional juga memperlihatkan peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 sebesar 75,02, meningkat sebesar 0,85% dari tahun 2023, meningkatnya Umur Harapan Hidup menjadi 79,93 (2023), penurunan prevalensi stunting menjadi 21,50% (2023), serta membaiknya sektor pendidikan di tahun 2022, dimana rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 9,08 dan peningkatan harapan lama sekolah sebesar 13,10⁴.

Faktor demografi Indonesia dinilai menjadi salah satu kelebihan dalam 5 tahun mendatang. Di tahun 2022, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia, sebesar 277 juta jiwa. Dengan proyeksi tingkat fertilitas sekitar 2%, pertumbuhan penduduk diperkirakan melambat pada periode 2025 – 2045, yakni di bawah 1%. Struktur penduduk Indonesia relatif menguntungkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi, yang pada 15 tahun mendatang diperkirakan rasio ketergantungan di bawah 50%⁵.

Indonesia memiliki kekuatan sumber daya alam yang berlimpah, baik hutan tropis yang luas, cadangan sumber daya energi dan mineral, energi terbarukan, keanekaragaman hayati dan ekosistem, sumber daya perikanan, maupun bioprospecting. Pengamanan rantai pasok global, mineral kritis, transisi energi, dan peningkatan daya saing SDM melalui kemitraan pendidikan dan pelatihan menjadi potensi kerja sama dan diplomasi di kawasan Pasifik dan Oseania.

⁴ Lampiran Permenlu No. 10/2025 Tentang Renstra Kemenlu Tahun 2025 – 2029

⁵ *Op.cit.*

Dengan bonus demografi dan kekayaan alam Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap kawasan Pasifik dan Oseania secara konkret dapat meningkatkan perdagangan Indonesia, memajukan pariwisata dan industri ekonomi kreatif, menarik investasi berkualitas, hilirisasi industri dan pengakuan profesionalitas tenaga kerja Indonesia di pasar-pasar strategis di kawasan Pasifik dan Oseania.

Peningkatan hubungan bilateral di Kawasan Pasifik dan Oseania

Kerja sama bilateral di kawasan Pasifik dan Oseania senantiasa dioptimalkan untuk mendukung tercapainya Asta Cita. Kawasan Pasifik dan memiliki potensi besar untuk mewujudkan kerja sama bilateral di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, swasembada, perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan, pembangunan desa, pengembangan koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, percepatan investasi serta perdagangan global yang bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia.

Penguatan kepemimpinan dan pengaruh dalam kerja sama regional dan bilateral di kawasan Pasifik akan memedomani Grand Design Strategi Kebijakan Pembangunan Indonesia (*Pacific Elevation*). Pedoman ini akan termanifestasi pada tujuan menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia serta mendorong kerja sama pembangunan dengan negara-negara di Pasifik.

Tingginya intensitas saling kunjung pejabat tinggi/delegasi Indonesia dan negara mitra di kawasan Pasifik dan Oseania, baik dalam rangka mekanisme forum bilateral maupun kunjungan untuk peninjauan/tindak lanjut kesepakatan kerja sama juga menjadi faktor peningkatan hubungan bilateral dan dalam forum regional. Hal ini berdampak positif pada meningkatnya komitmen dan ketertarikan pemangku kepentingan terkait untuk aktif menindaklanjuti kerja sama strategis antar pihak.

Kerja sama yang dikembangkan akan berfokus dalam mendorong kesepakatan yang mendukung Asta Cita, antara lain bidang swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, kerja sama pendidikan dan kesehatan serta kontribusi pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals*.

Peningkatan hubungan bilateral tercermin dari perluasan jejaring diplomatik. Pembukaan perwakilan Indonesia di kawasan Pasifik dan Oseania, serta pembukaan perwakilan asing dari negara-negara kawasan Pasifik dan Oseania di Indonesia turut menandai semakin eratnya ikatan bilateral.

Bagi Indonesia negara-negara di Pasifik merupakan mitra penting. Salah satu karakteristik penting yang memiliki nilai strategis dalam mewarnai hubungan dan

kerja sama Indonesia dengan sejumlah negara dan teritori di Pasifik adalah kesamaan budaya Melanesia dengan sejumlah Provinsi RI.

Kemitraan Indonesia dengan negara-negara Pasifik juga semakin diperkokoh dengan peningkatan kerja sama ekonomi dan konektivitas (khususnya dengan Kawasan Timur Indonesia) dalam rangka mewujudkan perdamaian dan kemakmuran bersama di Pasifik. Salah satunya dengan disepakatinya Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) serta negosiasi Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Fiji dan Papua Nugini.

Modalitas Kompetensi Diplomat

Kementerian Luar Negeri memiliki modalitas sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif, khususnya para diplomat yang memiliki penguasaan *soft skills* dan *hard skills* yang mendukung pelaksanaan diplomasi secara profesional. Kompetensi tersebut menjadi keunggulan strategis dalam memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi diplomasi Indonesia di berbagai kawasan dan forum internasional.

Dalam rangka penguatan kapasitas dan relevansi kompetensi diplomat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri secara berkesinambungan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan strategis global. Program tersebut mencakup antara lain pelatihan negosiasi, penguasaan bahasa asing, penulisan naskah dinas, komunikasi strategis, dan keprotokolan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi pengembangan SDM diplomatik yang berbasis kompetensi dan berorientasi hasil (*performance-based competency development*).

Keterampilan dan jejaring internasional yang dimiliki diplomat Indonesia merupakan *competitive advantage* yang memperkuat peran Kementerian Luar Negeri sebagai koordinator hubungan luar negeri di tengah meningkatnya intensitas dan keragaman aktor diplomasi. Kompetensi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung koordinasi, fasilitasi, dan sinergi hubungan luar negeri dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan pengembangan SDM Kementerian Luar Negeri, Direktorat Pasifik dan Oseania menempatkan penguatan dan penyelarasan kompetensi sebagai salah satu prioritas strategis dalam mendukung efektivitas pelaksanaan diplomasi kawasan. Upaya tersebut mencakup identifikasi kebutuhan kompetensi jabatan strategis, peningkatan kesesuaian antara profil SDM dengan tuntutan tugas dan peran organisasi, serta pengembangan talenta yang memiliki keunggulan tematik dan kawasan.

1.2.2. Permasalahan dan Tantangan

Dinamika Rivalitas *Great Powers*

Konstelasi di kawasan Indo-Pasifik masih ditandai rivalitas antar *great powers* yang disertai fenomena intensifikasi penggunaan ancaman (*use of force*), tantangan terhadap *rules-based order* dan hukum internasional, pemanfaatan negara-negara *proxy* untuk pengamanan kepentingan, menguatnya pendekatan minilateralisme seperti AUKUS dan QUAD, perang asimetris, dan memanasnya situasi di beberapa flashpoints seperti Semenanjung Korea, Selat Taiwan, dan Laut China Selatan. Ekonomi turut dimanfaatkan sebagai *leverage tool* geoekonomi dengan munculnya *Belt and Road Initiative* (BRI), *Global Development Initiative* (GDI), dan *Global Security Initiative* (GSI) RRT serta *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF) AS.

Selain rivalitas antar *great powers*, kawasan Indo-Pasifik juga masih dihadapkan pada sejumlah dinamika dan tantangan yang semakin kompleks antara lain perang di Ukraina, dinamika situasi di Gaza (terutama untuk pemulihan wilayah dan arus bantuan kemanusiaan), erosi kepercayaan terhadap multilateralisme, dan meningkatnya peran aktor non-negara.

Keamanan tradisional di kawasan Indo-Pasifik semakin *volatile* ditandai dengan menguatnya militerisasi kawasan dan meningkatnya kecenderungan aliansi pertahanan. Di luar tantangan tradisional, tantangan keamanan non-tradisional semakin mencuat dan memainkan peran yang sama pentingnya dengan isu-isu tradisional, seperti keamanan energi dan pangan, pandemi dan wabah global, perubahan iklim, kemunduran demokrasi global, kejahatan transnasional, dan *cutting edge technology* seperti *Artificial Intelligence*.

Menguatnya rivalitas antara AS dan RRT masih menjadi fitur geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Berbagai indikator menunjukkan bahwa kapabilitas RRT semakin mendekati AS, antara lain di bidang persenjataan, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan teknologi. Kemampuan militer RRT (ofensif dan defensif) diprediksi mencapai titik tertinggi pada tahun 2027. Situasi tersebut memunculkan spekulasi bahwa konstelasi global tengah bergerak menuju ke arah bipolar dengan AS dan RRT sebagai dua kekuatan utama.

Rivalitas *great powers* juga semakin meruncing di kawasan Pasifik Selatan. Dominasi Australia, AS, dan Selandia Baru sebagai mitra politik dan pembangunan di kawasan ini dihadapkan pada tantangan seiring dengan meningkatnya pengaruh RRT yang tercermin dari penandatanganan kesepakatan kerja sama keamanan antara RRT dan Solomon Islands pada April 2022, penandatanganan *Comprehensive Strategic Partnership* antara RRT dan Cook Islands pada Februari 2025, dan proyek-proyek infrastruktur bantuan RRT, antara lain pembangunan kompleks gedung Parlemen Vanuatu. Meningkatnya pengaruh RRT di kawasan

direspons AS dan Australia dengan penguatan hubungan diplomatik dan peningkatan bantuan pembangunan bagi negara-negara Pasifik Selatan, tercermin dengan pembukaan 6 (enam) misi diplomatik baru Australia di Pasifik sejak 2017 sebagai bagian dari kebijakan Pacific Step-Up Australia, dan penandatanganan kerja sama pertahanan AS dan PNG pada tahun 2023.

Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Global

IMF, dalam Publikasi World Economic Outlook April 2024, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,2% pada periode 2024 – 2025, sama seperti tahun 2023. Perlambatan ekonomi terutama terjadi di negara berkembang yang diperkirakan menurun dari 4,3% di 2023, menjadi 4,2% di tahun 2024 maupun 2024. IMF juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di 5 tahun mendatang sebesar 3,1%, tingkat paling rendah dalam 10 tahun terakhir.

Meskipun demikian, inflasi global diperkirakan lebih rendah dari 6,8% di tahun 2023, menjadi 5,8% (2024) dan 4,5 % (2025). Hal ini terutama atas kontribusi perekonomian negara maju yang diproyeksi dapat mencapai target inflasinya lebih cepat, dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Kondisi ini di luar perkiraan sebelumnya, ketika perekonomian global cenderung *resilient* meskipun banyak negara menerapkan kenaikan tingkat suku bunga bank sentral untuk mengatasi inflasi.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi global ke tingkat terendah dalam satu dekade terakhir, meskipun diiringi dengan tren penurunan inflasi, semakin diperburuk oleh perang dagang yang berkelanjutan dan meningkatnya proteksionisme, pada akhirnya memicu penerapan hambatan tarif dan non-tarif, termasuk sanksi, persyaratan konten lokal serta standar produk yang semakin kompleks.

Isu Diplomasi Kedaulatan

Diplomasi kedaulatan di kawasan Pasifik dan Oseania untuk memagari kedaulatan NKRI difokuskan melalui pendekatan secara bilateral dan melalui forum regional dan sub-regional kepada negara-negara Pasifik yang sejak lama dikenal memberikan perhatian terhadap isu-isu di wilayah timur Indonesia. Adanya misinformasi terkait perkembangan kondisi wilayah timur Indonesia, dan diperparah dengan adanya provokasi kelompok-kelompok tertentu, menyebabkan sering terjadinya mispersepsi sebagian masyarakat Pasifik terhadap Indonesia.

Di bawah visi *Pacific Elevation*, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kiprah diplomasi di kawasan Pasifik semakin tinggi, terutama dalam kapasitasnya sebagai mitra pembangunan yang dapat diandalkan. Terdapat kecenderungan bahwa sikap negara-negara di kawasan ini semakin positif terhadap Indonesia dan menghormati kedaulatan Indonesia atas seluruh wilayahnya, khususnya atas Papua.

Disrupsi Teknologi

Perkembangan teknologi yang pesat mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Perkembangan tersebut antara lain *Internet of Things* (IoT), *Blockchain*, dan *Artificial Intelligence* (AI). Disrupsi teknologi yang perlu dicermati khususnya di industri jasa keuangan, khususnya dengan munculnya perusahaan financial technology seperti bank digital, yang meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas akses jasa keuangan namun belum didukung dengan regulasi yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.

Selain keuangan, sektor pemerintahan juga mulai merasakan dampak dari disrupsi teknologi ini. Transformasi digital di sektor pemerintahan menghadirkan peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan aksesibilitas, namun juga memunculkan tantangan besar seperti keamanan data, integrasi sistem, dan kesenjangan kompetensi sumber daya manusia.

Dalam hal keamanan data, ancaman seperti serangan siber dan pelanggaran data pribadi semakin meningkat, tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh negara. Berdasarkan laporan Ransomware Task Force, sepanjang tahun 2023, terdapat lebih dari 6.500 serangan *ransomware* di 117 negara. Permintaan pembayaran atas serangan *ransomware* juga mencapai rekor USD 1,1 miliar atau dua kali lipat dari tahun sebelumnya, mulai dari pelaku yang tergabung dalam kelompok kriminal hingga aktor yang didukung oleh negara. Kemampuan teknologi juga diperkuat oleh kecerdasan buatan (AI), yang membuat ancaman menjadi semakin canggih dan sulit dideteksi.

Perubahan Iklim serta Kerawanan Energi dan Pangan

Perubahan iklim menimbulkan ancaman eksistensial bagi negara-negara Pasifik, yang menyumbang kurang dari 0,03% emisi gas rumah kaca global namun paling rentan terhadap dampaknya. Pada 2024, wilayah Asia-Pasifik Selatan-Barat mencatat suhu permukaan laut tertinggi sepanjang sejarah, dengan gelombang panas laut meliputi hampir 40 juta km² atau lebih dari 10% samudra global, merusak ekosistem laut dan ekonomi yang bergantung pada perikanan. Kenaikan permukaan laut rata-rata 3,3 mm per tahun mempercepat banjir pasang surut, di mana peristiwa ekstrem satu abad sekali diprediksi terjadi tahunan di seantero wilayah Pasifik pada 2050.

Kenaikan suhu global ke 1,5°C berpotensi memusnahkan 70–90% terumbu karang tropis, seperti pemutihan massal pada 2014 di Kepulauan Marshall, Guam, Mariana Utara, Hawaii Barat Laut, dan Kiribati. Cuaca ekstrem semakin parah, dengan siklon Pam (2015), Harold (2020), Judy dan Kevin (2023) menghancurkan Vanuatu, Fiji, serta Kepulauan Solomon. Di Fiji, erosi pantai dan banjir telah

merendam desa Serua Island, memaksa pertimbangan relokasi meski terikat kuat secara budaya dengan tanah leluhur.

Dampak ekonomi dan sosial mencakup penurunan potensi tangkapan ikan lebih dari 50% pada 2100 di 9 dari 16 entitas Pasifik seperti Kiribati, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu, mengancam pendapatan nasional (misalnya 66% di Kiribati dari lisensi perikanan). Suhu rata-rata daratan 2024 mencapai 0,48°C di atas periode 1991–2020, dengan kekeringan dan banjir ekstrem merusak pertanian, seperti kerugian ubi manis di Papua Nugini akibat El Niño dan hampir dua pertiga PDB Vanuatu dari Siklon Pam. Glacier tropis di Indonesia menuju kepunahan pada 2026, sementara lebih dari separuh penduduk Pasifik tinggal dekat pantai, menghadapi risiko perpindahan tahunan minimal 50.000 orang.

Sumber Daya Diplomasi yang Belum Memadai

Sumber daya yakni SDM, sarana prasarana dan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam mendukung optimalnya kegiatan diplomasi dan kerja sama internasional di kawasan Pasifik dan Oseania.

Jumlah formasi Direktorat Pasifik dan Oseania masih belum seluruhnya terpenuhi. Masih terdapat rumah jabatan yang kosong baik, terutama pada fungsional diplomat.

Postur anggaran yang dialokasikan untuk Direktorat Pasifik dan Oseania, meskipun menunjukkan peningkatan setiap tahun, masih belum optimal atau memadai untuk mendukung pelaksanaan diplomasi secara penuh. Dengan dinamika kebijakan penganggaran seperti instruksi penghematan, efisiensi, atau pemblokiran anggaran, akan sangat berpengaruh pada penyesuaian rencana, program dan target kinerja yang sudah direncanakan dari tahun sebelumnya. Postur anggaran yang terbatas secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemampuan Direktorat Pasifik dan Oseania untuk secara proaktif memperluas jangkauan diplomasi, misalnya partisipasi pada forum atau inisiatif diplomasi ekonomi dalam skala besar, yang diperlukan untuk mendukung Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045.

Pemenuhan sarana dan prasarana Direktorat Pasifik dan Oseania yang cukup untuk menjalankan pekerjaan, tugas dan fungsi sehari-hari juga menjadi salah satu tantangan yang masih terus diupayakan solusinya. Sebagai unit eselon II yang baru terbentuk pada tahun 2022, Direktorat Pasifik dan Oseania masih memerlukan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang baru dapat dipenuhi secara bertahap.

1.2.3. Analisis SWOT dan Mitigasi Risiko

Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Pasifik dan Oseania dalam menunaikan tugas diplomasi dan kerja sama internasional di kawasan Pasifik dan Oseania dapat digambarkan melalui analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*).

Dalam perencanaan kebijakan strategis, pemetaan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dapat membantu memahami keunggulan komparatif dan hal-hal yang perlu ditangani secara internal sebelum menyusun arah kebijakan luar negeri. Sementara itu, kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dapat memberikan informasi terkait hal-hal yang dapat dimanfaatkan dan risiko eksternal yang harus diantisipasi Kemenlu dalam menjalankan kebijakan luar negeri.

Gambar 1. Format Analisis SWOT

Strengths (S)	Weaknesses (W)
1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dan kondisi makroekonomi stabil. 2. Kelimpahan sumber daya manusia dan alam. 3. Kepemimpinan dan peran Indonesia yang semakin berpengaruh di forum regional dan sub-regional kawasan Pasifik dan Oseania (PIF, MSG). 4. Konsistensi politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Kemenlu 5. Peningkatan hubungan bilateral pasca penyelenggaraan beberapa kunjungan tingkat tinggi, kunjungan bisnis, dan forum di kawasan Pasifik dan Oseania (IPFD 2022, IPPP 2024, dsb). 6. Keahlian teknis Indonesia yang diperhitungkan di beberapa sektor di kawasan Pasifik dan Oseania. 7. Informasi mengenai akses pasar, peluang investasi, perdagangan serta peluang kerja sama di berbagai sektor di negara-negara di kawasan Pasifik dan Oseania	1. Kebijakan dalam negeri yang belum koheren. 2. Koordinasi antar lembaga/instansi dalam penyusunan kebijakan domestik yang berpengaruh kepada politik luar negeri Indonesia. 3. Kerentanan terhadap situasi ekonomi global. 4. Dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik. 5. Sumber daya diplomasi yang belum optimal (anggaran, infrastruktur fisik dan non fisik, SDM)

yang sudah terdiseminasi dengan baik untuk dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 8. Pengelolaan kerja sama bilateral yang semakin kuat. 9. Postur dan jangkauan diplomasi di kawasan Pasifik dan Oseania yang semakin meningkat dengan pembentukan Direktorat Pasifik dan Oseania dan rencana penambahan perwakilan RI di kawasan Pasifik dan Oseania (a.l. pembukaan KBRI Port Vila dan KBRI Honiara). 10. Keterampilan SDM yang memadai dalam penguasaan bahasa asing maupun isu kawasan.	
Opportunities (O) 1. Kawasan Pasifik dan Oseania potensial untuk peningkatan kerja sama bilateral dan regional di berbagai aspek, termasuk kerja sama pembangunan 2. Perluasan akses pasar produk Indonesia, a.l. industri strategis infrastruktur, pertahanan, digital, dsb. 3. Peran kepemimpinan Indonesia di kawasan Pasifik dan Oseania yang masih diperhitungkan oleh negara mitra dalam forum kerja sama regional dan sub-regional kawasan Pasifik dan Oseania. 4. Penguatan pengaruh kerja sama di kawasan Pasifik melalui Grand Design Strategi Kebijakan Pembangunan Indonesia (<i>Pacific Elevation</i>) dan <i>Strategic Framework for Elevating Development Partnership with the Pacific</i> 5. Masih adanya <i>untapped</i> market di kawasan Pasifik dan Oseania. 6. Perkembangan teknologi di kawasan Pasifik dan Oseania yang	Threats (T) 1. Instabilitas geopolitik di kawasan Pasifik dan Oseania yang berdampak pada ekonomi. 2. Perang dagang dan inflasi global. 3. Hambatan tarif dan non tarif yang berdampak pada perdagangan. 4. Rentannya <i>Global Supply Chain</i> termasuk sektor energi dan pangan. 5. Arus migrasi yang berpotensi memicu kejahatan transnasional. 6. <i>Non-traditional challenges</i>, a.l. perubahan iklim, pandemi, disrupsi teknologi, keamanan siber, terorisme lintas batas. 7. Pelemahan multilateralisme 8. Ancaman keamanan maritim di kawasan Pasifik dan Oseania. 9. Konektivitas di beberapa wilayah di kawasan Pasifik dan Oseania. 10. Perubahan kebijakan domestik yang berdampak pada kebijakan luar negeri. 11. Prinsip polugri bebas aktif Indonesia yang dapat dianggap ‘tidak tegas’ dalam isu-isu tertentu oleh konstituen domestik maupun

dapat diadopsi untuk mendukung diplomasi Indonesia.	<i>stakeholder</i> internasional.
7. Peran mediasi dalam konflik regional maupun internasional.	
8. Pendekatan diplomasi <i>soft power</i> Indonesia.	

Modalitas dalam Menjalankan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional di Kawasan Pasifik dan Oseania

Dari analisis di atas, dapat terlihat bahwa Indonesia memiliki berbagai modalitas untuk menjalankan politik luar negeri strategis, utamanya pada diplomasi dan kerja sama internasional di kawasan Pasifik dan Oseania.

Indonesia memiliki situasi politik dan ekonomi domestik yang kondusif untuk menjalankan kebijakan luar negeri. Salah satunya melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan didukung dengan SDA dan SDM yang berlimpah. Indonesia juga memiliki multi-identitas sebagai modal penting untuk menjadi representasi di forum internasional maupun bermitra dengan negara-negara serupa; yaitu negara berkembang, negara kepulauan/maritim, negara demokrasi ketiga terbesar dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Konsistensi Indonesia dengan prinsip bebas aktif dan rekam jejak positif dalam isu perdamaian dan anti kolonialisme juga menjadi kredibilitas Indonesia sebagai *reliable partner* dalam pembangunan. Modalitas dimaksud dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan berbagai potensi yang telah dipetakan saat ini, antara lain mitra pembangunan, *soft power*, peran diaspora, serta peran strategis di kawasan Pasifik dan Indo-Pasifik. Dari sisi kepemimpinan dan peran aktif, Indonesia memiliki peran yang masih diperhitungkan oleh negara mitra dalam forum kerja sama regional dan sub-regional kawasan Pasifik dan Oseania.

Mengelola Kelemahan, Tantangan, dan Risiko ke Depan

Terlepas dari berbagai modalitas dimaksud, masih terdapat isu yang dapat mempengaruhi kredibilitas Indonesia di dunia internasional. Posisi Indonesia yang cukup bergantung pada rantai pasok global juga menjadikan rentan terhadap volatilitas ekonomi global. Selain itu, meskipun memiliki peran meningkat di forum internasional dan presensi menguat dalam hubungan bilateral, Indonesia belum cukup melakukan *engagement* komunikasi global secara optimal guna menyampaikan narasi kebijakan luar negerinya.

Dari postur anggaran, Kementerian Luar Negeri tergolong dalam Kementerian Tipe Sedang yang memiliki anggaran kecil dari Rp10 triliun dan jumlah pegawai dibawah 7 ribu orang. Tantangan ini secara langsung menjadi tantangan yang

sama bagi postur anggaran Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, termasuk postur anggaran Direktorat Pasifik dan Oseania, yang dapat mempengaruhi rencana program dan kegiatan diplomasi, pemenuhan sarana prasarana serta pengembangan kompetensi SDM yang memerlukan spesialisasi isu-isu tertentu.

Dalam menghadapi tren pengerahan misi diplomatik untuk isu global seperti rivalitas *great powers*, diplomasi kedaulatan, disrupsi teknologi, perkembangan AI, kesehatan global, ketegangan di kawasan, ketidakpastian ekonomi, serta perubahan iklim, ancaman ketahanan pangan dan energi, Direktorat Pasifik dan Oseania menghadapi tantangan dalam penyusunan posisi dan kebijakan luar negeri, utamanya untuk isu-isu sektoral yang memerlukan kompetensi dan pengetahuan tersendiri dari para diplomat serta koordinasi dengan kementerian/lembaga teknis untuk menyamakan pandangan.

Untuk itu, Direktorat Pasifik dan Oseania perlu memastikan bahwa dukungan pemangku kepentingan domestik dan postur diplomasinya kondusif dan memadai untuk menjalankan diplomasi dan kerja sama yang berorientasi *bridge-building*, tidak terjebak dalam kompetisi, berpihak pada kesejahteraan negara berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

1.3. Capaian Rencana Strategis Direktorat Pasifik dan Oseania tahun 2020-2024

Periode 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 memandatkan Kemenlu untuk berkontribusi pada Agenda Pembangunan ke-7, yaitu “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”. Kemenlu mengampu PP ke-2, yaitu “Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri” yang memiliki 4 (empat) Kegiatan Prioritas (KP), yaitu (1) Peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global, (2) Penguatan integritas NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri, (3) Penguatan kerja sama pembangunan internasional, dan (4) Peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional.

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, termasuk Direktorat Pasifik dan Oseania, berkontribusi pada KP “Peningkatan Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global” melalui aktivitas diplomasi dan kerja sama internasional di berbagai bidang.

Kawasan Pasifik dan Oseania berperan penting dalam mendukung pencapaian kepentingan nasional Indonesia serta memiliki keterkaitan langsung dengan stabilitas dan kesejahteraan regional. Arti strategis dari kawasan ini tercermin dari beberapa capaian diplomasi Indonesia, mulai dari diplomasi perbatasan, diplomasi kedaulatan sampai pada diplomasi ekonomi.

Diplomasi bilateral Indonesia dilakukan pada segala tingkat baik pada Kepala Negara/Pemerintahan, Menteri Luar Negeri, Menteri Koordinator maupun tingkat Menteri lainnya, termasuk juga kunjungan tamu kehormatan dari negara mitra serta partisipasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi, Pertemuan Tingkat Menteri, Pertemuan Tingkat *Senior Official* pada forum kerja sama kawasan Aspasaf.

Penguatan mekanisme bilateral dilakukan melalui revitalisasi dan reaktivasi penyelenggaraan *Joint Commission on Bilateral Cooperation* (JCBC), *Joint Commission Meeting* (JCM), *Joint Ministerial Commission* (JMC), *Joint Working Group* (JWG), *Foreign Office Consultation*, *Joint Working Group*, *Joint Task Force* (JTF), *2+2 Foreign and Defence Ministers' Meeting*, dan skema bilateral lainnya dengan negara sahabat. Partisipasi aktif pada upaya terpadu penanganan masalah WNI/TKI hingga kasus lain dilakukan melalui kerja sama dengan Direktorat PWNI, Perwakilan RI dan pemangku kepentingan terkait.

Pembentukan Direktorat Pasifik dan Oseania pada Ditjen Aspasaf (2022) memperkuat implementasi *Pacific Elevation* melalui peningkatan hubungan dengan Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, dan negara-negara Pasifik lainnya. Pembentukan Direktorat Pasifik dan Oseania Pasifik dan Oseania didasarkan pada Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 6 Tahun 2021.

Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh di Tingkat Regional dan Global

Kepemimpinan Indonesia mengusung solusi bagi tantangan global, membangun kemitraan saling menguntungkan, menciptakan stabilitas kawasan, mendorong perdamaian dunia, memajukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, responsif terhadap isu perubahan iklim, lingkungan hidup, maritim, maupun berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks hubungan multilateral pada forum kerja sama di kawasan Pasifik dan Oseania, peran Indonesia diwujudkan melalui partisipasi aktif pada berbagai forum regional dan sub-regional. Direktorat Pasifik dan Oseania secara aktif berkontribusi dalam berbagai inisiatif, termasuk menjadi host dari berbagai pertemuan internasional, termasuk di antaranya pelatihan bidang *Information and Communication Technology* (ICT) pada periode tahun 2021-2023 bagi Sekretariat *Organisation of African, Caribbean and Pacific States* (OACPS) dan pelatihan bidang ekonomi kreatif untuk seluruh negara anggota OACPS pada tahun 2024 dan 2025 yang dilaksanakan di Bali.

Indonesia memanfaatkan forum kerja sama regional untuk mendorong pembahasan area prioritas seperti percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, upaya memerangi *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing*, konservasi terumbu karang, manajemen perikanan, ekonomi biru, perubahan

iklim, pertumbuhan berkelanjutan, pembangunan ekonomi, transisi energi, dan kerja sama pendanaan.

Keberhasilan prakarsa, rekomendasi dan gagasan Indonesia yang diterima pada forum regional dan sub-regional terefleksi di antaranya pada pertemuan KTT ke-22 MSG di Port Vila. Indonesia menyampaikan kemungkinan akses terhadap Melanesian *Free Trade Agreement* (MFTA) dan dukungan atas *proceedings* permintaan *advisory opinion* dampak perubahan iklim di ICJ. *Joint Communique* menyepakati keikutsertaan Indonesia dalam pengembangan MSG *Travel Card*, meminta Sekretariat untuk menjajaki *trade arrangement* yang tepat untuk Indonesia, serta menyepakati MSG sebagai organisasi dan anggotanya sebagai individual akan berpartisipasi pada *proceedings* permintaan *advisory opinion* dampak perubahan iklim di ICJ.

Diplomasi Indonesia di kawasan diintensifkan melalui prakarsa dan rekomendasi Indonesia untuk mengawal kepentingan nasional melalui. Indonesia aktif sebagai mitra dialog pada *Pacific Islands Forum* (PIF) dan status Indonesia sebagai *Associate Member* pada *Melanesian Spearhead Group* (MSG).

Diplomasi Ekonomi di Kawasan Pasifik dan Oseania

Pelaksanaan diplomasi di kawasan Pasifik dan Oseania diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut perdagangan, investasi dan pariwisata.

1. Bidang Perdagangan dan Pembukaan Akses Pasar

Laporan Kinerja Direktorat Pasifik dan Oseania mencatat peningkatan jumlah komitmen perdagangan di kawasan Pasifik dan Oseania selama 3 (tiga) tahun yakni 19 (tahun 2022), 20 (tahun 2023) dan 22 (tahun 2024). Tingginya angka komitmen perdagangan tidak terlepas dari strategi diplomasi ekonomi Direktorat Pasifik dan Oseania yakni fasilitasi kegiatan promosi ekonomi dan pengawalan komitmen perdagangan, investasi dan pariwisata.

Salah satu capaian utama diplomasi ekonomi sektor perdagangan di kawasan Pasifik dan Oseania Asia Pasifik dan Afrika, yakni penyelesaian Perjanjian Perdagangan Bebas *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA – CEPA) pada tahun 2020.

Pada *event* tahunan seperti Trade Expo Indonesia (TEI), partisipasi negara mitra kawasan Pasifik dan Oseania menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada TEI tahun 2020, Australia termasuk ke dalam sepuluh negara dengan transaksi terbesar.

2. Investasi

Pada sektor investasi, tercatat dinamika peningkatan komitmen investasi yang diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut investasi, seperti business matching, pembukaan pasar potensial dan unggulan, dan forum kerja sama di Kawasan Pasifik dan Oseania.

Australia menjadi satu-satunya negara dari kawasan Pasifik dan Oseania yang termasuk ke dalam 10 negara investor terbesar di Indonesia pada tahun 2024 dengan 6.772 proyek.

Perolehan komitmen investasi yang berhasil dicapai tercatat dari bermacam sektor seperti keberlanjutan pembangunan IKN, energi, kesehatan, dan industri lainnya. Sejumlah investasi proyek strategis di Indonesia yang dihasilkan dari kerja sama kawasan Pasifik dan Oseania, antara lain:

a. Pembangunan IKN

Pada Februari 2024, telah dilakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara OIKN dan *National Capital Authority of Australia* tentang Inisiatif Ibu Kota.

b. Fasilitas Sektor Swasta Indonesia

Diplomasi berhasil memfasilitasi kerja sama sektor swasta Indonesia dengan negara mitra di kawasan Pasifik dan Oseania, yakni Australia, antara lain:

- Sektor pertambangan
 - i. Sinarmas Group: Avenira Phosphate Project, Ravenswood Gold Mine, Bowen Basin Coal Mine
 - ii. Delta Dunia Makmur (BUMA): Downer Mining Operations
 - iii. Salim Group (MACH Energy): Mount Pleasant Coal Mine, dengan nilai US\$ 224 juta
 - iv. Salim Group: Hunter Valley Coal Operations, Hillside Copper-Gold Project (US\$ 393 juta)
 - v. Adaro Energy: Kestrel Coal Mine (US\$ 2,25 miliar)
- Konstruksi dan pengembangan property
 - i. Golden Sedayu Group: Burswood Point Development

c. Penerbitan Surat Utang Negara dalam Mata Uang Asing

Diplomasi Indonesia juga turut berkontribusi dalam fasilitasi kerja sama penerbitan surat utang negara dalam denominasi mata uang asing. Mengikuti jejak keberhasilan Samurai Bonds (Jepang), pada tahun 2025 Pemerintah Indonesia menerbitkan Kangaroo Bonds (Australia). Upaya ini merupakan strategi untuk

memperluas sumber pembiayaan APBN dan menarik investor global dari berbagai wilayah strategis.

Kangaroo Bonds merupakan surat utang yang diterbitkan oleh entitas asing di pasar Australia dengan denominasi dolar Australia. Pemerintah Indonesia menerbitkan Kangaroo Bond perdana pada Agustus 2025 senilai AUD800 juta, terdiri dari dua seri: 5 tahun (AUD500 juta, kupon 4,40%) dan 10 tahun (AUD300 juta, kupon 5,30%). Penerbitan ini sangat diminati investor, dengan order book mencapai AUD8 miliar, dan menjadi milestone kerja sama ekonomi Indonesia-Australia.

3. Pariwisata

Pada bidang pariwisata, Australia menjadi salah satu negara penyumbang wisatawan terbesar di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, yakni 654.464 orang (2022), 1.431.177 orang (2023), 1.671.222 orang (2024), dan 1.599.923 (Januari-November 2025). Selama empat tahun terakhir, kawasan Pasifik dan Oseania menyumbang wisatawan mancanegara sebesar 722.524 orang (2022), 1.625.760 orang (2023), 1.957.643 orang (2024), dan 1.905.865 orang (Januari-November 2025).

Perkembangan jumlah wisatawan ke Indonesia mengalami dinamika adanya penurunan signifikan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 akibat pandemi dan kemudian merangkak naik pada tahun 2022 dan seterusnya. Penyelenggaraan promosi pariwisata, partisipasi pada pameran wisata internasional, peningkatan konektivitas dengan negara mitra, serta promosi pariwisata di media lokal pada negara akreditasi merupakan bagian dari upaya diplomasi pariwisata. Selain itu, protokol implementasi *Protocol Cleanliness, Health, Safety & Environment* (CHSE) Sustainable pasca pandemi, serta banyaknya kegiatan internasional yang diselenggarakan di Indonesia, seperti rangkaian acara G20, *Indonesia-Pacific Forum for Development* (IPFD), *Bali Democracy Forum* dan ICAWE turut berkontribusi pada peningkatan jumlah kunjungan dari mancanegara.

Direktorat Pasifik dan Oseania telah dan senantiasa memberikan fasilitasi dan pengawalan promosi terpadu pariwisata, baik untuk pengusaha lokal di bidang pariwisata serta mitra kerjasamanya maupun wisatawan potensial di negara mitra.

Beberapa capaian pada sektor pariwisata antara lain:

1. Adanya pemutakhiran daftar bebas visa kunjungan dan *Visa on Arrival* dari kawasan Pasifik dan Oseania, yakni Australia, Papua Nugini, dan Selandia Baru.
2. Peningkatan konektivitas dengan pembukaan beberapa rute penerbangan langsung, termasuk di antaranya Denpasar-Adelaide, Denpasar-Newcastle

Australia, Denpasar-Darwin (2025), Denpasar – Port Moresby, dan Auckland – Denpasar (2023).

3. Intensitas kegiatan internasional yang diselenggarakan di Indonesia yang berkontribusi dalam meningkatkan jumlah kunjungan dari mancanegara baik melalui kegiatan seminar terpadu, *sales mission*, *familiarization trip*, pameran budaya dan pariwisata, serta kegiatan promosi lainnya yang melibatkan kelompok masyarakat, *travel agent* dan pemangku kepentingan setempat.

Kesepakatan Bilateral di Kawasan Pasifik dan Oseania

Direktorat Pasifik dan Oseania turut mendukung penyelenggaraan hubungan bilateral yang mencakup sejumlah bidang, yakni ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan, serta maritim. Selain kerja sama pada perdagangan, investasi dan pariwisata, kerja sama dalam lingkup bilateral juga dilakukan dalam berbagai area tematik lainnya. Tidak hanya menyusun kerja sama baru, Direktorat Pasifik dan Oseania juga memiliki peran pemantauan dan koordinasi atas tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari kesepakatan kerja sama oleh para stakeholder, yaitu satker Kemenlu Pusat, kementerian/lembaga teknis terkait, organisasi bisnis, dan sebagainya.

Dalam catatan Laporan Kinerja Direktorat Pasifik dan Oseania pada indikator kinerja kesepakatan bilateral, selama tahun 2023-2024 tercatat peningkatan jumlah kesepakatan bilateral yaitu 12 kesepakatan tahun 2023 dan 15 kesepakatan pada tahun 2024, termasuk di antaranya:

- Penandatanganan Rencana Aksi Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Australia tahun 2020-2024.
- Penandatanganan Rencana Aksi Kemitraan Komprehensif Indonesia-Selandia Baru tahun 2020-2024.
- *Defence Cooperation Agreement* Indonesia-Australia tahun 2024

Intensifnya koordinasi dan konsolidasi internal dengan pemangku kepentingan dalam negeri serta negara mitra untuk menetapkan posisi Pemri, meningkatnya intensitas kunjungan pejabat tinggi pada level kepala negara/ kepala pemerintahan, serta adanya upaya pemanfaatan peluang atas kondisi global merupakan salah satu faktor yang mendorong disepakatinya perjanjian dengan negara mitra. Selain terbentuknya kesepakatan, terdapat pula kesepakatan kerja sama bilateral yang perlu ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri agar manfaatnya semakin terasa di masyarakat Indonesia, yang mencakup berbagai sektor, diantaranya kerja sama bidang kesehatan, energi, perdagangan, keuangan, pelayanan publik, konsultasi bilateral, hingga bantuan kemanusiaan.

Dalam rangka memperkuat hubungan bilateral, Indonesia terus aktif melaksanakan pembaharuan serta penandatanganan Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD), yang mencerminkan intensitas diplomasi

Indonesia di kawasan Pasifik dan Oseania. Tercatat Indonesia sudah menjalin PBVDD dengan beberapa negara kawasan Asia Pasifik dan Afrika antara lain Fiji, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon.

Indonesia mempertimbangkan dan menganalisa keperluan pembukaan perwakilan di luar negeri, termasuk di antaranya rencana pembukaan Perwakilan RI di Port Villa dan Perwakilan RI di Honiara.

Dalam konteks lebih luas, selain diplomasi ekonomi dalam hal peningkatan perdagangan, investasi dan pariwisata, beberapa aspek diplomasi tematik lainnya turut mewarnai kiprah Indonesia selama lima tahun ke belakang.

1. Diplomasi Kesehatan

Tahun 2020 – 2022, dunia internasional dihadapkan dengan tantangan pandemi COVID-19. Diplomasi Indonesia berada di garis terdepan, dengan mengamankan pasokan lebih dari 516 juta dosis vaksin bagi kebutuhan domestik, di mana 26,5% diantaranya adalah hibah melalui kerja sama internasional.

Beberapa strategi Indonesia dalam hal penguatan ketahanan kesehatan antara lain:

1. Indonesia hadir memberikan bantuan bagi Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Fiji saat pandemi Covid-19. Indonesia memberi perhatian melalui program beasiswa bagi tenaga kesehatan maupun pelatihan dan peningkatan kapasitas.
2. Dukungan Pemerintah Australia melalui alokasi dana untuk Indonesia sebesar AUD 101,9 juta untuk periode 2020-2023, yang meliputi bantuan teknis maupun hibah, dalam kerangka *COVID-19 Vaccine Access and Health Security Initiative for the Pacific and Southeast Asia* (VAHSI).
3. Kerja sama bidang kesehatan RI-Australia juga tercermin dalam rencana Aspen Medical untuk membangun 23 rumah sakit (Kelas A dan B) dan 650 klinik di Indonesia dengan nilai investasi sebesar USD 1,5 miliar. Kerja sama tersebut telah dimulai melalui Inaugurasi Proyek Aspen Medical Hospital Depok dan *Soil Turning Ceremony* rumah sakit pertama di Depok pada Juni 2023.

2. Diplomasi Kemanusiaan dan Bantuan Hibah

Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi pasca bencana di berbagai negara Pasifik, seperti penanggulangan Bencana Siklon Judy dan Kevin di Vanuatu sebesar IDR 7,6 miliar pada Mei 2023 serta bantuan rehabilitasi gedung VIP Bandara Internasional Bauerfield, Vanuatu, dengan nilai bantuan sekitar IDR26 miliar (melalui PT PP dengan serah terima proyek pada Desember 2023). Selain itu, pada Desember 2024 Indonesia juga mengirimkan bantuan

kemanusiaan untuk masyarakat yang terdampak gempa bumi di Vanuatu. Bantuan yang dikirimkan meliputi tim *Emergency Medical Team* (EMT) yang terdiri dari 15 tenaga kesehatan profesional dan bantuan kebutuhan dasar senilai USD 726,9 ribu. Pemberian bantuan ini tidak hanya sebagai bentuk kepedulian dan nilai kemanusiaan, tetapi memiliki makna strategis bagi upaya menjaga momentum positif peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Vanuatu.

3. Transisi energi

Beberapa catatan kerja sama bilateral bidang energi antara Indonesia dan negara di kawasan Pasifik dan Oseania, terutama Australia, menunjukkan komitmen dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dan mengatasi tantangan perubahan iklim. Penguatan kerja sama tersebut diwujudkan dengan penandatanganan sejumlah kesepakatan bilateral RI-Australia, antara lain:

1. MoU tentang pembentukan mekanisme bilateral untuk memajukan kolaborasi kendaraan listrik (2023).
2. MoU antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan *Department of Climate Change, Energy, the Environment, and Water* (DCCEEW) tentang kerja sama di bidang transisi energi (2024).
3. MoU antara Kementerian ESDM dan Pemerintah Northern Territory tentang rantai pasok mineral kritis dan material strategis (2024).

4. Diplomasi Indonesia di Pasifik melalui visi *Pacific Elevation*

Dalam upaya menciptakan kawasan yang stabil dan sejahtera, Indonesia memperkuat kerja sama ASEAN dan PIF melalui kerangka *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP). Berbagai inisiatif telah dilaksanakan, termasuk *Pacific Exposition* (PE) tahun 2021, visi *Pacific Elevation* tahun 2019, dan *Indonesia Pacific Forum for Development* (IPFD) tahun 2022.

Selain itu, melalui kerja sama pembangunan di kawasan Pasifik, Indonesia secara konsisten memberikan bantuan pembangunan bagi negara-negara di kawasan, termasuk dengan mendukung tujuan-tujuan pembangunan kerja sama regional di wilayah tersebut. Sebagai bukti konkret, Indonesia memberikan bantuan pembangunan Stadion Futsal Multifungsi di Kepulauan Solomon dan renovasi Queen Victoria School di Fiji. Secara total, Indonesia telah memberikan program peningkatan kapasitas kepada sekitar 1.750 peserta dari 15 negara/teritori di kawasan Pasifik selama periode 1999 hingga 2022.

Lebih lanjut, Indonesia juga terus memperkuat dimensi pembangunan subkawasan melalui hibah pelatihan perikanan untuk mendukung *MSG Roadmap for Inshore Fisheries Management and Sustainable Development 2015–2024*, serta menawarkan pelatihan diplomatik bagi diplomat muda negara-negara

anggota MSG. Indonesia juga memberikan dukungan bagi peningkatan fasilitas Sekretariat MSG.

Melalui inisiatif *Indonesia-Pacific Forum for Development* (IPFD) pada Desember 2022, Indonesia dan berbagai negara Pasifik telah menggagas *The Bali Message for Development Cooperation in the Pacific* yang mendorong empat sektor prioritas kerja sama pembangunan bersama, yakni pertanian, perikanan, infrastruktur, dan pendidikan. *Bali Message* membuka peluang penciptaan momentum kerja sama yang lebih besar bagi peningkatan kemakmuran, penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta menemukan solusi bagi tantangan global bersama ke depannya.

Pacific Exposition II pada tahun 2021 diselenggarakan secara *virtual*, menampilkan 200 *booth* dari perusahaan dan instansi pemerintahan negara-negara Pasifik, termasuk dari 6 provinsi di Indonesia Timur. Acara ini menghasilkan potensi transaksi bisnis senilai USD 104 juta atau sekitar IDR 1,48 triliun, serta menarik lebih dari 40.000 pengunjung secara *hybrid*.

Indonesia memandang *Melanesian Spearhead Group* (MSG) sebagai forum strategis dalam memperkuat diplomasi kedaulatan dan solidaritas pembangunan di kawasan Melanesia. Forum ini memiliki anggota Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan FLNKS dari Kaledonia Baru, dengan Sekretariat di Port Vila, Vanuatu. Indonesia diterima sebagai *Associate Member* sejak 2015, setelah sebelumnya berstatus *Observer* sejak 2011. Indonesia telah aktif berpartisipasi pada KTT MSG ke-22 tahun 2023 di Port Vila, Vanuatu dan KTT ke-23 tahun 2025 di Suva, Fiji. Selaku *Associate Member* yang memberikan kontribusi finansial Indonesia juga menghadiri pertemuan reguler *MSG Budget* yang membahas program-program strategis baik di tingkat Menteri maupun SOM.

Dalam setiap forum/pertemuan, Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama pembangunan dan keamanan dengan negara-negara anggota MSG. Sambutan positif yang diberikan MSG terhadap Indonesia menunjukkan adanya penguatan dukungan terhadap hubungan bilateral dan kerja sama regional yang konstruktif.

Pada kerangka *Pacific Islands Forum* (PIF), Indonesia terus menunjukkan komitmen kemitraan dengan kawasan Pasifik melalui pendekatan inklusif dan solidaritas pembangunan berdasarkan prinsip saling menghormati, termasuk dalam hal kedaulatan dan integritas wilayah serta prinsip non-intervensi.

Indonesia senantiasa menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama di bidang yang menjadi kepentingan bersama khususnya sektor kelautan dan perubahan iklim. Program kemitraan Indonesia dengan PIF diupayakan dapat selaras dengan *2050 Strategy for the Blue Pacific Continent* yang menjadi landasan kerja jangka panjang PIF ke depan. Indonesia berkeinginan untuk terus bekerja sama dengan

PIF termasuk melalui rencana dukungan bagi *Pacific Resilience Facility* (PRF) yang dibentuk PIF untuk meningkatkan ketahanan kawasan.

Dalam forum *Organization of African, Caribbean and Pacific States* (OACPS), Ditjen Aspasaf c.q. Dit Pasifik dan Oseania berperan dalam memastikan kehadiran dan kontribusi Indonesia dalam mendorong kerja sama di bidang pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan kerja sama Selatan–Selatan. Indonesia telah memberikan kontribusi nyata berupa bantuan kerja sama teknis dalam bentuk pelatihan *Information and Communication Technology* (ICT) pada periode tahun 2021-2023 bagi Sekretariat OACPS serta pelatihan di bidang ekonomi kreatif untuk seluruh negara anggota OACPS pada tahun 2024 dan 2025 yang dilaksanakan di Bali.

Peran aktif Indonesia tersebut telah mendorong OACPS untuk menempatkan Indonesia sebagai mitra strategis. Dengan pandangan ini, Presiden RI diundang untuk menghadiri KTT OACPS di Angola bulan Desember 2022 yang kehadirannya diwakili oleh Wapres RI New York.

Guna mengimplementasikan visi *Pacific Elevation*, dan menindaklanjuti Bali Message sebagai hasil dari *Indonesia – Pacific Forum for Development* (IPFD), Direktorat Pasifik dan Oseania bekerja sama dengan Pusat SKK Aspasaf – BSKLN Kemlu, LPPSP FISIP Universitas Indonesia dan PACIS Universitas Katolik Parahyangan telah menyusun dokumen “*Towards Shared Prosperity and Resilience*” - *Indonesia’s Strategic Framework for Elevating Development Partnership with the Pacific*. Dokumen ini merupakan *roadmap* dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait di Indonesia mengenai peningkatan kerja sama dengan negara-negara di Pasifik.

Terdapat 4 (empat) klaster kerja sama dalam *Strategic Framework* yang telah ditetapkan dan sejalan *2050 Strategy for the Blue Pacific Continent*, yaitu: (1) *Economic Development and Connectivity*, (2) *People-Centered Development*, (3) *Ocean, Environment, and Security Cooperation*, and (4) *Climate Change and Disaster Management*.

Kerja sama ini akan dilaksanakan pada periode 2025 hingga 2029, serta akan ditinjau secara berkala untuk memastikan keberlanjutan program dan dampaknya secara nyata.

5. Diplomasi Perbatasan

Salah satu capaian diplomasi perbatasan di kawasan Pasifik dan Oseania, yakni kunjungan Menlu RI dan Menlu Papua Nugini ke pos perbatasan Skouw-Wutung di sela pertemuan *Joint Ministerial Commission* Indonesia-Papua Nugini pada Mei 2024.

Di level teknis, Indonesia dan Papua Nugini juga memiliki forum pertemuan reguler tiap tahun untuk isu-isu yang mencakup kerja sama yang khusus membahas isu-isu perbatasan yaitu *Border Liaison Officers Meeting* (BLOM), *Border Liaison Meeting* (BLM) dan *Joint Border Committee* (JBC). Selama periode 2022-2024 (pasca pandemi) pertemuan-pertemuan tersebut secara reguler terus dilaksanakan.

Pengarusutamaan Gender dalam Diplomasi

Direktorat Pasifik dan Oseania mendukung perwujudan dan peningkatan komitmen kesetaraan gender di lingkungan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta mengupayakan tersedianya lingkungan yang aman bagi semua pegawai, bebas dari diskriminasi dan dari pelecehan seksual, melalui implementasi efektif Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Surat Edaran Menteri Luar Negeri Nomor SE/00031/KP/11/2021/03 Tahun 2021.

Pada aspek penguatan kelembagaan, kebijakan dan infrastruktur, Direktorat Pasifik dan Oseania telah menjadi anggota pada Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Pejabat Penerima Pengaduan terkait Tindakan Pelecehan Seksual pada Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika setiap tahun.

Integrasi isu gender dengan kegiatan Direktorat Pasifik dan Oseania tercermin dari partisipasi aktif Indonesia pada pembahasan serta dialog dalam bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita dalam forum bilateral, antara lain:

1. Sebagai bagian dari pelaksanaan *Annual Leaders Dialogue* RI - Papua Nugini, telah diangkat penandatanganan MoU Bidang Kerja Sama Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Masuknya elemen promosi *Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) sebagai salah satu aksi pada Rencana Aksi Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Australia 2025-2029.

BAB II | VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi Direktorat Pasifik dan Oseania

Kementerian Luar Negeri menetapkan visi untuk periode 2025 – 2029, yakni:

“Memantapkan ketangguhan diplomasi Indonesia dalam memperkuat hubungan internasional yang kondusif serta berkontribusi pada tata kelola global yang mendukung pembangunan nasional, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.”

Visi tersebut diterjemahkan pada visi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, yakni:

“Memantapkan ketangguhan diplomasi Indonesia dalam memperkuat hubungan internasional yang kondusif di kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta berkontribusi pada tata kelola global yang mendukung pembangunan nasional, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.”

Sebagai bentuk pengejawantahan visi Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Pasifik dan Oseania menetapkan visi berikut:

“Memantapkan ketangguhan diplomasi Indonesia dalam memperkuat hubungan internasional yang kondusif di kawasan Pasifik dan Oseania, serta berkontribusi pada tata kelola global yang mendukung pembangunan nasional, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.”

2.2 Misi Direktorat Pasifik dan Oseania

Pada RPJMN 2025 – 2029, Kemenlu mengampu dua Prioritas Nasional (PN) yakni:

1. PN 2: “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru”;
2. PN 7: “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”;

Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga mendukung PN 8 yakni “Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya,

peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.”

Pada periode 2025 – 2029, Kementerian Luar Negeri melaksanakan misi untuk mendukung ketiga PN dimaksud sebagai berikut:

1. Memperkuat hubungan internasional yang kondusif untuk menjaga kedaulatan NKRI dan ketahanan nasional.
2. Memajukan diplomasi ekonomi untuk meningkatkan dan memperluas kemitraan ekonomi yang berkeadilan, saling menguntungkan, dan membawa manfaat konkret bagi kesejahteraan dan kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan peran aktif untuk memperkuat kepemimpinan dan pengaruh di kawasan dan global yang berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran di kawasan dan dunia.
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap WNI di luar negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia.
5. Meningkatkan peran strategis diaspora Indonesia dalam pembangunan nasional.
6. Meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara besar, berdaulat dan berpengaruh di mata masyarakat internasional melalui penguatan postur diplomasi Indonesia.

Selaras dengan misi Kementerian Luar Negeri periode 2025 - 2029, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika menetapkan misi untuk lima tahun ke depan:

1. Memajukan diplomasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika untuk meningkatkan dan memperluas kemitraan ekonomi yang berkeadilan, saling menguntungkan, dan membawa manfaat konkret bagi kesejahteraan dan kemandirian bangsa.
2. Meningkatkan peran aktif untuk memperkuat kepemimpinan dan pengaruh di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran di kawasan Asia Pasifik dan Afrika dan dunia.
3. Mewujudkan postur diplomasi yang tangguh di lingkungan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dalam rangka peningkatan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara besar, berdaulat dan berpengaruh di masyarakat internasional.

Guna menjaga keselarasan antara misi Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika periode 2025-2029, Direktorat Pasifik dan Oseania telah menetapkan misi untuk lima tahun ke depan, yakni:

1. Memajukan diplomasi ekonomi di kawasan Pasifik dan Oseania untuk meningkatkan dan memperluas kemitraan ekonomi yang berkeadilan, saling

menguntungkan, dan membawa manfaat konkret bagi kesejahteraan dan kemandirian bangsa.

2. Meningkatkan peran aktif untuk memperkuat kepemimpinan dan pengaruh di kawasan Pasifik dan Oseania yang berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran di kawasan Pasifik dan Oseania dan dunia.
3. Mewujudkan postur diplomasi yang tangguh di lingkungan Direktorat Pasifik dan Oseania dalam rangka peningkatan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara besar, berdaulat dan berpengaruh di masyarakat internasional.

2.3 Tujuan Direktorat Pasifik dan Oseania

Tujuan Kementerian Luar Negeri sebagaimana dirumuskan pada Renstra 2025 – 2029 terdiri atas:

1. Memantapkan integritas kedaulatan NKRI dan diplomasi ketahanan nasional.
2. Meningkatkan diplomasi ekonomi untuk memajukan kemitraan ekonomi, meningkatkan daya saing, memperluas peluang, memperkuat posisi tawar Indonesia, dan membawa manfaat konkret bagi kesejahteraan dan kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan dan global yang diakui sebagai positive force, aktor kunci, dan bagian dari solusi yang berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran kawasan dan dunia.
4. Meningkatkan kerja sama pembangunan internasional yang responsif, fleksibel, dan tanggap terhadap dinamika global sebagai alat strategis untuk memperkuat pengaruh diplomasi Indonesia.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap WNI di luar negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia.
6. Meningkatkan keterlibatan aktif diaspora Indonesia secara strategis dalam pembangunan nasional.
7. Mengoptimalkan diplomasi soft power Indonesia dalam mendukung pencapaian kepentingan nasional.
8. Memperkuat postur diplomasi guna meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia.

Merujuk pada tujuan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika berupaya mewujudkan visi dan misi dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan diplomasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika untuk memajukan kemitraan ekonomi, meningkatkan daya saing, memperluas peluang, memperkuat posisi tawar Indonesia, dan membawa manfaat konkret bagi kesejahteraan dan kemandirian bangsa.

2. Meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang diakui sebagai *positive force*, aktor kunci, dan bagian dari solusi yang berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran kawasan dan dunia.
3. Memperkuat postur diplomasi guna meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia melalui tata kelola organisasi yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika.

Selaras dengan tujuan Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika tersebut, Direktorat Pasifik dan Oseania berupaya mewujudkan visi dan misi dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan diplomasi ekonomi di kawasan Pasifik dan Oseania untuk memajukan kemitraan ekonomi, meningkatkan daya saing, memperluas peluang, memperkuat posisi tawar Indonesia, dan membawa manfaat konkret bagi kesejahteraan dan kemandirian bangsa.
2. Meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan Pasifik dan Oseania yang diakui sebagai *positive force*, aktor kunci, dan bagian dari solusi yang berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran kawasan dan dunia.
3. Memperkuat postur diplomasi guna meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia melalui tata kelola organisasi yang baik di lingkungan Direktorat Pasifik dan Oseania.

Pelaksanaan tujuan Direktorat Pasifik dan Oseania dimaksud akan tergambar dari sejumlah indikator kinerja yang terukur yakni:

1. Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Kawasan Pasifik dan Oseania;
2. Persentase Kesepakatan Kerja Sama Bilateral di Kawasan Pasifik dan Oseania yang Ditindaklanjuti oleh Pemegang Kepentingan Dalam Negeri;
3. Persentase Prakarsa/Rekomendasi pada Forum Regional di Kawasan Pasifik dan Oseania yang Ditindaklanjuti oleh Pemegang Kepentingan Dalam Negeri;
4. Jumlah Kesepakatan Bilateral yang Dihasilkan di Kawasan Pasifik dan Oseania;
5. Persentase Data *Economic Intelligence* dari Kawasan Pasifik dan Oseania yang Ditindaklanjuti Pemegang Kepentingan Dalam Negeri;
6. Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi/ yang Diterima pada Forum Regional di Kawasan Pasifik dan Oseania; dan
7. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Pasifik dan Oseania.

2.4 Sasaran Program Direktorat Pasifik dan Oseania

Pada Renstra 2025-2029 Kemenlu masih mengadopsi indikator-indikator yang masih relevan dengan visi misi yang akan dijalankan pada periode 5 tahun kedepan. Dalam kaitan tersebut, Kementerian Luar Negeri telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis, sementara Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika telah menetapkan 6 (enam) sasaran program untuk dicapai dalam kurun waktu tersebut. Selaras dengan hal tersebut dan meninjau relevansinya, Direktorat Pasifik dan Oseania memiliki 5 (lima) sasaran program untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1. Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan Pasifik dan Oseania.

Sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Direktorat Pasifik dan Oseania, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri serta amanat kinerja dari Presiden RI, kinerja diplomasi ekonomi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang perdagangan, investasi, dan wisatawan mancanegara. Hal ini ditujukan agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air.

Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal merupakan jumlah nominal manfaat secara ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang paling menguntungkan yang dihasilkan oleh berbagai kerja sama dan hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata antara negara.

Diplomasi Ekonomi adalah pelaksanaan kebijakan diplomasi dalam bidang hubungan luar negeri secara bilateral, regional dan multilateral untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi serta memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional dalam sektor perdagangan, investasi, pariwisata, ketenagakerjaan, finansial, kerja sama pembangunan internasional, dan bidang lainnya.

Arti kata Optimal berarti paling baik dan tertinggi.

Pengukuran menggunakan indeks efektivitas diplomasi ekonomi, dengan target Direktorat Pasifik dan Oseania adalah 81 pada tahun 2025 dan 83 pada tahun 2029.

2. Diplomasi bilateral yang kuat di kawasan Pasifik dan Oseania.

Dalam dinamika relasi antar negara, kepentingan Indonesia di bidang tersebut diperjuangkan melalui diplomasi bilateral. Relasi bilateral perlu didorong untuk bersifat mutualistik, yakni di satu sisi dapat memastikan terjaganya kepentingan Indonesia, dan di sisi lain, relasi tersebut mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Hubungan bilateral mencakup sejumlah bidang, yakni ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan, serta maritim. Sejumlah hal menyangkut kepentingan Indonesia dapat diusulkan, dan selanjutnya dibahas melalui proses negosiasi dan perundingan. Kinerja terkait sasaran ini adalah keberhasilan mencapai kesepakatan yang memberikan *assurance* terhadap terjaganya kepentingan Indonesia dalam hubungan antar negara di kawasan Pasifik dan Oseania.

Diplomasi Bilateral adalah pelaksanaan kebijakan diplomasi dalam bidang hubungan luar negeri secara bilateral.

Kuat adalah teguh, tidak mudah goyah dan mempunyai keunggulan.

Pengukuran menggunakan persentase kesepakatan bilateral yang dihasilkan di kawasan Pasifik dan Oseania dengan target yang meningkat sampai 98.15% pada tahun 2029 serta melalui persentase *data economic intelligence* dari kawasan Pasifik dan Oseania yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri dengan target yang menunjukkan peningkatan mencapai 100% sampai dengan tahun 2029.

3. Diplomasi regional yang kuat di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Sasaran strategis ini berfokus pada pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan diplomasi regional. Relasi multilateral di kawasan regional perlu didorong untuk bersifat mutualistik, yakni di satu sisi dapat memastikan terjaganya kepentingan Indonesia, dan di sisi lain, relasi tersebut mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Hubungan multilateral mencakup sejumlah bidang, yakni ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan, serta maritim. Kepentingan Indonesia di bidang tersebut dapat diperjuangkan melalui diplomasi regional. Sejumlah hal menyangkut kepentingan Indonesia dapat diusulkan, dan selanjutnya dibahas melalui forum kerja sama di kawasan regional. Kinerja sasaran strategis ini adalah keberhasilan mencapai kesepakatan yang memberikan *assurance* terhadap terjaganya kepentingan Indonesia dalam hubungan kerja sama di kawasan regional Pasifik dan Oseania.

Diplomasi Regional adalah pelaksanaan kebijakan diplomasi dalam kerja sama regional.

Arti kata Kuat adalah teguh, tidak mudah goyah dan mempunyai keunggulan.

Pengukuran menggunakan persentase gagasan/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum regional di kawasan Pasifik dan Oseania dengan target 100%.

4. Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi di kawasan Pasifik dan Oseania.

Pada tingkat bilateral serta forum-forum regional terdapat kesepakatan-kesepakatan yang disetujui bersama oleh Indonesia dan negara-negara lain. Kesepakatan tersebut perlu diimplementasikan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Direktorat Pasifik dan Oseania perlu memberikan rekomendasi kepada K/L *focal point* untuk mengimplementasikan atau menindaklanjuti kesepakatan bilateral, regional, dan multilateral terkait di tingkat nasional. Fungsi yang dilakukan Kemenlu adalah untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut terimplementasi dengan baik.

Dukungan adalah sokongan/bantuan.

Komitmen adalah (upaya) perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu.

Kebijakan luar negeri adalah sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Kesepakatan internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

Arti kata Tinggi adalah (mendukung) secara penuh.

Pengukuran menggunakan persentase kesepakatan kerja sama bilateral di kawasan Pasifik dan Oseania dan prakarsa atau rekomendasi Indonesia pada forum kerja sama Intrakawasan dan antarkawasan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri dengan target 100% sampai dengan tahun 2029.

5. Tata Kelola Organisasi Direktorat Pasifik dan Oseania yang Baik.

Tata Kelola Organisasi Direktorat Pasifik dan Oseania yang baik adalah salah satu unsur dari postur diplomasi yang kuat yang merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi.

Keberadaan postur diplomasi yang kuat turut ditopang oleh Pengelolaan Anggaran yang optimal dan akuntabel serta pengelolaan aset.

Postur diplomasi meliputi reformasi birokrasi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik diplomasi, penguatan pemanfaatan infrastruktur teknologi dan penerapan keamanan informasi, serta transformasi digital.

Arti kata Kuat adalah teguh, tidak mudah goyah dan mempunyai keunggulan.

Indikator turunan sasaran program ini, yakni Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Pasifik dan Oseania. Nilai AKIP Direktorat Pasifik dan Oseania diproyeksikan meningkat mencapai 77,60 (BB) pada tahun 2029. Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Tabel 1. Indikasi Risiko
Sasaran Program Direktorat Pasifik dan Oseania 2025-2029

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko
1.	Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan Pasifik dan Oseania	1. Kurangnya dukungan dan koordinasi dengan K/L dan pemangku kepentingan domestik lain (pelaku usaha, asosiasi, dll.) untuk meningkatkan diplomasi ekonomi di sektor perdagangan, investasi dan pariwisata. 2. Kurangnya ketertarikan negara mitra untuk meningkatkan hubungan ekonomi seperti investasi dan perdagangan di komoditas yang menjadi prioritas bagi Indonesia, termasuk dengan penerapan berbagai hambatan perdagangan.

		3. Tidak tercapainya target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia. 4. Penyelenggaraan kegiatan mengalami penundaan disebabkan oleh perubahan prioritas dan arahan pimpinan, kurangnya koordinasi, pengalihan anggaran, serta keterbatasan waktu dalam melakukan persiapan kegiatan. 5. Identifikasi peluang kerja sama ekonomi baru maupun pengembangan sektor potensial dengan negara mitra belum memanfaatkan dengan optimal. 6. Dinamika persaingan geopolitik dan geoekonomi, instabilitas geopolitik dan geoekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan dan aktivitas ekonomi global (termasuk pada sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata). 7. Kurangnya pengetahuan para pemangku kepentingan di Indonesia, baik pemerintah maupun swasta terkait potensi ekonomi dan pembangunan negara-negara mitra terutama mitra non-tradisional Indonesia. 8. Ketersediaan data dan analisis pasar yang andal sebagai dasar perumusan kebijakan serta promosi diplomasi ekonomi yang belum memadai.
2.	Diplomasi bilateral yang kuat di kawasan Pasifik dan Oseania	1. Terbatasnya partisipasi atau representasi Indonesia dalam pertemuan dan sidang regional maupun multilateral karena keterbatasan sumber daya (manusia dan anggaran). 2. Masih belum optimalnya keselarasan/sinkronisasi antara kertas posisi Indonesia dengan <i>stakeholder</i> K/L terkait. 3. Berkurangnya dukungan terhadap Indonesia dan rendahnya tingkat kerja sama dengan negara lain baik pada lingkup bilateral. 4. Penyelenggaraan pertemuan mekanisme bilateral yang sangat tergantung pada kesediaan jadwal pejabat pada tingkat yang disepakati. Sebagai contoh pertemuan Sidang Komisi Bersama pada tingkat Menteri Luar Negeri. 5. Perbedaan kepentingan nasional dan/atau prioritas Pemri dengan negara mitra. 6. Perubahan prioritas dan kebijakan negara mitra yang berdampak pada kelangsungan kerja sama atau pembahasan isu strategis yang sedang berlangsung. 7. Dinamika politik di negara mitra yang mengakibatkan kevakuman politik dan pada keberlanjutan proses negosiasi, penyelesaian/penandatanganan, hingga pelaksanaan kesepakatan bilateral.

		8. Kurangnya koherensi posisi dasar Pemerintah Indonesia di antara K/L terkait dalam pertemuan internasional dan optimalisasi kesepakatan posisi dasar Indonesia dengan K/L terkait. 9. Kurangnya pengetahuan para pemangku kepentingan di Indonesia, baik pemerintah, BUMN maupun swasta terkait potensi ekonomi dan pembangunan negara-negara mitra terutama mitra non-tradisional Indonesia.
3.	Diplomasi Regional yang kuat di Kawasan Pasifik dan Oseania	1. Berkurangnya dukungan terhadap Indonesia dan rendahnya tingkat kerja sama dengan negara lain baik pada lingkup regional, maupun multilateral. 2. Rendahnya dukungan terhadap pencalonan Indonesia pada forum regional dan multilateral di kawasan Pasifik dan Oseania. 3. Pembatasan jumlah delegasi dan kehadiran delegasi untuk hadir berpartisipasi pada sidang regional maupun multilateral. 4. Terbatasnya partisipasi atau representasi Indonesia dalam pertemuan dan sidang regional maupun multilateral karena keterbatasan sumber daya (manusia dan anggaran). 5. Masih belum optimalnya keselarasan/sinkronisasi antara kertas posisi Indonesia dengan <i>stakeholder</i> K/L terkait. 6. Keterlibatan dan peran Perwakilan RI di negara-negara anggota dalam penjajakan posisi negara anggota organisasi regional yang belum optimal pada forum regional dan multilateral. 7. Kurangnya koordinasi pelaksanaan dan laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pertemuan regional.
4.	Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi di kawasan Pasifik dan Oseania	1. Perbedaan prioritas dan kepentingan antara K/L maupun mitra terkait dengan perjanjian maupun kesepakatan internasional yang menyebabkan tidak adanya atau terhambatnya tindak lanjut. 2. Kurangnya sosialisasi dan edukasi publik terkait manfaat dan urgensi kesepakatan internasional yang berimplikasi pada rendahnya dukungan publik. 3. Tidak adanya implementasi konkret dari pemangku kepentingan domestik terhadap kesepakatan yang telah terjalin dengan negara mitra dalam pertemuan-pertemuan di tingkat Pejabat Tinggi (SOM), Menteri, dan Kepala Negara. 4. Belum optimalnya tindak lanjut <i>Data Economic Intelligence</i> oleh pemangku kepentingan dalam negeri. 5. Kurangnya pemahaman publik mengenai pentingnya kebijakan luar negeri RI dan kesepakatan internasional

		yang melibatkan Indonesia akibat tidak optimalnya diseminasi hasil kesepakatan beserta dampaknya ataupun rekomendasi hasil sidang internasional, baik di kalangan umum, akademisi, praktisi dan LSM. 6. Koordinasi dan mekanisme movev antar K/L guna tindak lanjut hasil kesepakatan serta penyesuaian perubahan kelembagaan pada administrasi pemerintahan baru yang belum berjalan optimal. 7. Tidak sinkronnya aspirasi publik dengan posisi, kebijakan, maupun kesepakatan Indonesia dalam kebijakan luar negeri dengan negara mitra maupun pada organisasi internasional. 8. Keterbatasan anggaran yang dapat menyebabkan ketidaksiapan instansi terkait untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan.
5.	Tata Kelola Organisasi Direktorat Pasifik dan Oseania yang Baik	1. Proses perencanaan yang kurang optimal karena muncul kegiatan/program mendadak dan kegiatan yang batal secara tiba-tiba sehingga berdampak pada realisasi anggaran dan target kinerja. 2. Penyampaian Laporan Kinerja tidak tepat waktu dan tidak dilengkapi dengan analisis capaian kinerja yang memadai. 3. Tidak tercapainya nilai AKIP Direktorat Pasifik dan Oseania sesuai target. 4. Perubahan target kinerja yang dipengaruhi kondisi dan situasi terkini. 5. Terbatasnya sumber daya meliputi kecukupan SDM, sarana prasarana serta anggaran yang mendukung implementasi kebijakan luar negeri. 6. Rendahnya realisasi anggaran Direktorat Pasifik dan Oseania karena dinamika pelaksanaan kegiatan yang tidak terlaksana. 7. Tidak regular atau tertundanya Dialog Kinerja Organisasi. 8. Pengelolaan aset yang kurang optimal seperti ketidaksesuaian dalam pencatatan aset, pemeliharaan sarana dan prasarana, pemanfaatan sistem pengadaan secara maksimal. 9. Belum optimalnya tata kelola pengawasan intern berbasis risiko.

BAB III | ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Luar Negeri

Arah dan Kebijakan Luar Negeri kedepan akan mengikuti dan mendukung arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang diundangkan melalui Undang-Undang nomor 59 tahun 2024. RPJPN 2025- 2045 memiliki tujuan utama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan.

Kebijakan luar negeri Indonesia akan dioptimalkan untuk memantapkan kepemimpinan yang lebih proaktif guna menjaga stabilitas kawasan dan global serta berperan penting dalam pembentukan tatanan internasional. Arah kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah: (i) penguatan peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai agenda setter di tingkat regional, utamanya dalam menjadi *effective leader* di ASEAN, dan global; (ii) pemantapan tata kelola kebijakan luar negeri guna merespon dinamika geopolitik dan geoekonomi, serta disrupsi teknologi digital dan perubahan iklim; (iii) penguatan kedaulatan, hak berdaulat, kerja sama pertahanan dan keamanan guna penguatan kapabilitas pertahanan negara, serta menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian dunia; (iv) pemajuan nilai, budaya, dan ideologi guna peningkatan citra Indonesia di dunia internasional; serta (v) penguatan kerja sama ekonomi dan pembangunan internasional untuk memperteguh diplomasi dan posisi Indonesia di kawasan dan global.

Ketangguhan diplomasi akan difokuskan pada diplomasi antara lain terkait isu kedaulatan, diplomasi ekonomi, kepemimpinan Indonesia, Kerja Sama Pembangunan Internasional, Diplomasi Publik, Pelindungan WNI, diplomasi di tingkat bilateral, regional hingga multilateral serta penguatan Postur Diplomasi.

Pada tahap pertama RPJPN ini, pengembangan diplomasi difokuskan pada penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi.

Visi Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yakni “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, akan dicapai melalui 8 Misi Asta Cita yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Mempertahankan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dari kedelapan misi Asta Cita tersebut, Kemenlu terutama berperan dalam Pelaksanaan Asta Cita 2 dan Asta Cita 7, serta turut berperan pada Asta Cita 8.

PN 2 Mempertahankan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Negara yang kuat adalah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan negara yang baik yang dapat melindungi dan menjamin kedamaian di dalam wilayah negara kesatuan. Sistem pertahanan keamanan negara tersebut mencakup pula upaya diplomasi dan Politik Luar Negeri.

Dalam kaitan ini dipandang perlu upaya untuk terus meningkatkan wibawa Indonesia sebagai negara besar dan berdaulat di mata masyarakat internasional, dengan memantapkan supremasi kepemimpinan Indonesia di tingkat global melalui diplomasi yang berdasarkan atas asas bebas aktif.

Sementara itu, kemandirian bangsa mencerminkan kapabilitas sebuah bangsa untuk berdiri tanpa bergantung pada negara lain. Untuk itu pembangunan nasional perlu difokuskan pada upaya mencapai swasembada dalam berbagai sektor

krusial yang mencakup sektor pangan sebagai pilar kehidupan bangsa; sektor energi sebagai pendorong inovasi dan kemajuan; sektor air sebagai fondasi kehidupan yang berkelanjutan; dan sektor ekonomi kreatif yang memperlihatkan keunikan dan kekayaan budaya.

Ekonomi hijau perlu dikedepankan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, serta ekonomi biru untuk menekankan nilai penting dari kekayaan kelautan Indonesia.

Dapat ditambahkan bahwa perempuan memiliki peran penting dan strategis dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan ekonomi biru. Dalam ekonomi hijau, perempuan berkontribusi melalui praktik ramah lingkungan di rumah tangga, usaha kecil berbasis alam, serta kepemimpinan dalam pelestarian sumber daya alam.

Sementara dalam ekonomi biru, perempuan berperan dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, pelestarian ekosistem pesisir, dan pengembangan potensi maritim yang tidak merusak lingkungan. Pemberdayaan perempuan di kedua sektor ini akan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus memperhatikan perspektif gender agar potensi perempuan sebagai agen perubahan dapat dioptimalkan sepenuhnya.

PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Aspek yang krusial dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab adalah reformasi dalam bidang politik, hukum, dan birokrasi. Reformasi ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan yang merugikan masyarakat, seperti korupsi dan pemakaian narkoba, ataupun upaya untuk dapat terus meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada seluruh WNI, baik di dalam maupun luar negeri.

Upaya-upaya tersebut harus dilaksanakan dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Hal ini tidak hanya mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjunjung nilai integritas dan keadilan, tetapi juga untuk melindungi generasi penerus dari ancaman yang bisa menghambat potensinya.

PN 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Pada prioritas nasional ini diharapkan setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menjaga toleransi antarumat beragama, keberlanjutan alam, sekaligus melestarikan nilai dan warisan budaya sebagai landasan transformasi pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Kemenlu memiliki peran yang cukup penting dalam rangka menyebarkan nilai-nilai toleransi antarumat beragama yang dimiliki Indonesia kepada masyarakat internasional melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan ataupun diikuti. Selain itu, Kemenlu juga mengembangkan nilai dan warisan budaya Indonesia di dunia internasional agar memiliki manfaat bagi pembangunan nasional.

Pelaksanaan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian pada tahun 2025 akan dilaksanakan melalui lima program, yaitu:

1. Program Diplomasi dan Kerja Sama Internasional;
2. Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja Sama Multilateral;
3. Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional;
4. Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik; dan
5. Program Dukungan Manajemen.

Selanjutnya untuk periode 2026-2029 telah disepakati penyederhanaan program Kementerian Luar Negeri menjadi tiga program, meliputi:

1. Program Diplomasi dan Kerja Sama Internasional
2. Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik
3. Program Dukungan Manajemen.

Penyederhanaan program dimaksud berdasarkan Surat Edaran Bersama Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan atas nama Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor 4 tahun 2025 dan Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan nomor 2/MK/AG/2025 tanggal 23 Juli 2025 tentang Daftar Program Kementerian/Lembaga.

3.1.1 Arah Kebijakan Kementerian Luar Negeri

Renstra Kemenlu 2025 – 2029 menetapkan arah kebijakan Kemenlu yaitu:

1. Penguatan integritas kedaulatan NKRI yang mendukung ketahanan nasional;
2. Peningkatan diplomasi ekonomi untuk memajukan kemitraan ekonomi, meningkatkan daya saing, memperluas peluang, dan memperkuat posisi Indonesia;

3. Peningkatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan regional dan global sebagai kekuatan positif, aktor kunci, dan bagian dari solusi yang berkontribusi terhadap stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran kawasan dan dunia;
4. Peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang responsif, berkesinambungan, fleksibel, dan tanggap terhadap dinamika global sebagai instrumen strategis untuk memperkuat pengaruh diplomasi Indonesia;
5. Peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap WNI di luar negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia dan pelayanan publik yang prima;
6. Peningkatan keterlibatan aktif potensi diaspora Indonesia dalam mendukung pencapaian kepentingan nasional;
7. Peningkatan diplomasi *soft power* untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional; dan
8. Penguatan postur diplomasi guna meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika menentukan arah kebijakan dengan tetap menjaga kesinambungan dengan strategi kebijakan Kemenlu. Selaras dengan penajaman program yang dilakukan Kemenlu, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika mengampu 2 (dua) program yaitu

1. Program Diplomasi dan Kerja Sama Internasional
2. Program Dukungan Manajemen.

3.2.1 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Selaras dengan arah kebijakan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika memiliki arah kebijakan:

1. Peningkatan diplomasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika untuk memajukan kemitraan ekonomi, meningkatkan daya saing, memperluas peluang, dan memperkuat posisi Indonesia;
2. Peningkatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika sebagai kekuatan positif, aktor kunci, dan bagian dari solusi yang berkontribusi terhadap stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran kawasan dan dunia;
3. Penguatan postur diplomasi guna meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia melalui tata kelola organisasi yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika.

3.2.2 Strategi Kebijakan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Sebagai upaya mewujudkan arah kebijakan, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika akan menjalankan strategi, yaitu:

1. Arah kebijakan peningkatan diplomasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika untuk memajukan kemitraan ekonomi, meningkatkan daya saing, memperluas peluang, dan memperkuat posisi Indonesia memiliki strategi sebagai berikut:
 - a. Mendorong transformasi pertanian Indonesia, termasuk penguatan swasembada pangan, melalui kerja sama internasional di bidang teknologi pertanian, riset agrikultur, dan pembukaan akses pasar global bagi komoditas pertanian unggulan.
 - b. Memperluas kemitraan strategis di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) melalui diplomasi energi, promosi investasi hijau, serta pengembangan rantai pasok global yang mendukung transisi energi nasional.
 - c. Memfasilitasi ekspansi BUMN Indonesia di pasar global melalui promosi branding BUMN *Go Global* serta dukungan dan kolaborasi dalam program promosi terpadu di luar negeri.
 - d. Mengembangkan ekosistem startup nasional melalui kerja sama internasional di bidang inovasi digital, teknologi kecerdasan buatan, serta peningkatan mobilitas dan kapasitas talenta muda Indonesia.
 - e. Mendorong penghapusan hambatan perdagangan terhadap produk unggulan Indonesia serta memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum-forum ekonomi internasional guna melindungi kepentingan nasional.
 - f. Mengarusutamakan diplomasi ekonomi digital sebagai penggerak pertumbuhan inklusif, melalui penguatan kerja sama di bidang AI, keamanan siber, ekonomi kreatif, dan transformasi digital lintas negara.
 - g. Menggalang dukungan internasional bagi pembangunan hijau di Indonesia melalui optimalisasi akses terhadap pendanaan iklim, promosi investasi hijau, dan diplomasi pembangunan berkelanjutan yang berbasis prinsip keadilan iklim.
 - h. Memperkuat kerja sama maritim di kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta pada forum global untuk mendukung penguatan ekonomi biru (*blue economy*), perlindungan sumber daya laut, konektivitas, serta peningkatan kapasitas.
 - i. Mendorong perluasan akses dan penetrasi dagang Indonesia dengan negara-negara potensial non-tradisional guna mengantisipasi fluktuasi perdagangan eksisting, terutama negara besar.
 - j. Mendorong pemanfaatan instrumen kebijakan ekonomi negara/wilayah akreditasi untuk kepentingan Indonesia, terutama pada proyek strategis

- nasional, perluasan basis produksi industri manufaktur, hilirisasi, dan penguatan ketahanan pangan.
- k. Mendorong finalisasi *Grand Design* Diplomasi Ekonomi;
 - l. Mendorong finalisasi *Grand Design* Strategi Kebijakan Indonesia di Kawasan Pasifik (*Pacific Elevation*);
 - m. Memperkuat strategi kebijakan luar negeri yang mendukung Asta Cita, seperti isu ketahanan pangan, energi dan air,
 - n. Mendorong solusi iklim yang adil dan inklusif melalui UNFCCC, kerja sama regional, dan kemitraan lainnya.
 - o. Mendorong Pemanfaatan dashboard Investolink dan pengembangan Sistem Informasi Diplomasi Ekonomi (SIDE) dalam mendukung upaya penguatan diplomasi ekonomi.
2. Arah kebijakan peningkatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika sebagai kekuatan positif, aktor kunci, dan bagian dari solusi yang berkontribusi terhadap stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran kawasan dan dunia memiliki strategi sebagai berikut:
- a. Meningkatkan peran aktif dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
 - b. Melanjutkan peran aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral, regional, maupun multilateral sesuai dengan amanat konstitusi, serta memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
 - c. Memperkuat kerja sama multilateral dan regional dalam isu-isu terkait perdamaian dan keamanan internasional, hak asasi manusia, migrasi, kebencanaan, demokrasi, kerja sama ekonomi strategis, pembangunan berkelanjutan, kemaritiman, lingkungan hidup, serta kemitraan strategis, kesehatan global, kependudukan, pendidikan, kebudayaan, ketenagakerjaan, pariwisata, kerja sama parlemen, dan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai badan utama dan subsider PBB serta forum kerja sama multilateral dan regional lainnya yang menguntungkan kepentingan nasional.
 - d. Mengoptimalkan keanggotaan Indonesia pada pelbagai forum internasional dan kawasan, untuk menyuarakan dan mendorong inisiatif-inisiatif baru yang makin mengakomodasi kepentingan nasional dan kepentingan *Global South*.
 - e. Mendorong penyelesaian damai dan berkelanjutan atas krisis Myanmar melalui fasilitasi dialog inklusif, penguatan peran ASEAN, serta kerja sama regional dan internasional guna mewujudkan stabilitas dan perdamaian kawasan.
 - f. Meningkatkan peran Indonesia baik melalui mekanisme bilateral maupun ASEAN dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar guna tercapainya repatriasi yang aman, sukarela, dan

bermartabat bagi para pengungsi serta mendorong terciptanya stabilitas keamanan di Rakhine State.

- g. Meningkatkan kerja sama dan *trust-building* di kawasan Indo-Pasifik yang terfokus pada pengembangan kerja sama kemaritiman, konektivitas dan infrastruktur, serta pembangunan.
- h. Menunjukkan kepemimpinan Indonesia selaku koordinator kemitraan ASEAN-Australia periode 2024-2027 melalui 4 (empat) prioritas utama sebagaimana disampaikan pada 57th AMM/PMC pada Juli 2024, dalam bidang politik (terkait pencegahan konflik dan pengelolaan krisis; kerja sama maritim; mendorong transparansi dan non-proliferasi di kawasan), dalam bidang ekonomi (terkait ketahanan pangan; transisi energi yang berkeadilan; serta implementasi efektif *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA) dan RCEP), dalam bidang sosial budaya (terkait pemanfaatan *ASEAN-Australia Centre*), dan dalam Implementasi AOIP (dengan memanfaatkan kemitraan ASEAN-Australia sebagai sarana dalam meningkatkan engagement dengan *Pacific Island Forum* (PIF), *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dan *Indian Ocean Rim Association* (IORA).
- i. Mendorong pemanfaatan upaya Australia dalam meningkatkan investasi dan perdagangan dua arah di kawasan Asia Tenggara dan untuk mengakomodasi kepentingan Indonesia dalam bidang ketahanan pangan, transisi energi berkelanjutan, dan pembangunan *Joint Ventures*, pertukaran pengetahuan, serta fasilitas pendanaan di sektor-sektor prioritas melalui implementasi *Invested: Australia's Southeast Asia Economic Strategy to 2040*.
- j. Mendorong keterwakilan Indonesia dan atau Warga Negara Indonesia untuk menduduki posisi-posisi strategis di organisasi internasional guna memastikan pengaruh dan kepemimpinan Indonesia dalam proses penyusunan norma dan atau kebijakan organisasi internasional.
- k. Menegaskan kepemimpinan Indonesia melalui optimalisasi pemanfaatan peran Indonesia sebagai ketua dan/atau tuan rumah pertemuan serta pusat koordinasi kerja sama regional dan internasional yang berlokasi di Indonesia. Memperkuat dialog perumusan kebijakan luar negeri (di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) melalui *Policy Planning Dialogue* dengan mitra strategis;
- l. Meningkatkan kemitraan dengan akademisi dan lembaga think tank dan mendorong peran dan kontribusinya dalam perumusan strategi kebijakan nasional terkait kerja sama di berbagai Kawasan dan forum multilateral, serta isu khusus;
- m. Melaksanakan survei dan penyusunan *foresight* untuk mempersiapkan strategi kebijakan dalam menghadapi tantangan global dan regional ke depan, termasuk trend-trend global. Mendorong Kemitraan antara Parlemen dan Pemerintah dan antar-Parlemen Negara Anggota Asian Parliamentary Assembly.

3. Arah kebijakan penguatan postur diplomasi guna meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia melalui tata kelola organisasi yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika memiliki strategi sebagai berikut:
 - a. Memperkuat postur dan sumber daya diplomasi dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan/ penyelenggaraan kebijakan luar negeri;
 - b. Memperkuat kinerja koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia melalui pengembangan kemampuan komponen postur diplomasi.
 - c. Memperkuat strategi transformasi digital sebagai upaya penguatan *diplomatic tools* Kemlu.
 - d. Mendukung penguatan kapasitas SDM berperspektif gender dan membentuk tim penggerak PUG lintas unit.

3.2.3 Strategi Kebijakan Direktorat Pasifik dan Oseania

Dalam rangka mendukung perwujudan arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Pasifik dan Oseania akan menjalankan strategi, yaitu:

1. Arah kebijakan peningkatan diplomasi ekonomi di kawasan Pasifik dan Oseania untuk memajukan kemitraan ekonomi, meningkatkan daya saing, memperluas peluang, dan memperkuat posisi Indonesia memiliki strategi sebagai berikut:
 - a. Memperkuat kerja sama di bidang teknologi pertanian, riset agrikultur, dan pembukaan akses pasar global bagi komoditas pertanian unggulan, termasuk melalui penandatanganan dan implementasi kesepakatan bilateral.
 - b. Memperkuat kerja sama di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) melalui diplomasi energi, promosi investasi hijau, serta pengembangan rantai pasok global yang mendukung transisi energi nasional, termasuk dengan melibatkan tidak hanya unsur pemerintah, tetapi juga swasta.
 - c. Melakukan pelibatan BUMN Indonesia dalam program investasi dua arah dan pelaksanaan kerja sama pembangunan.
 - d. Memperkuat kerja sama di bidang inovasi digital, teknologi kecerdasan buatan, serta peningkatan mobilitas dan kapasitas talenta muda Indonesia, baik dengan memanfaatkan kerangka kerja sama yang telah ada, maupun pembuatan kerangka kerja sama baru.
 - e. Melakukan pembahasan penghapusan hambatan perdagangan terhadap produk unggulan Indonesia secara intensif dengan negara-negara mitra dagang Indonesia.
 - f. Memperkuat kerja sama di bidang AI, keamanan siber, ekonomi kreatif, dan transformasi digital lintas negara, melalui implementasi kesepakatan yang telah ada dan penandatanganan kesepakatan baru.
 - g. Menggalang dukungan negara-negara mitra di kawasan Pasifik dan Oseania, terutama terkait optimalisasi akses terhadap pendanaan iklim,

- promosi investasi hijau, dan diplomasi pembangunan berkelanjutan yang berbasis prinsip keadilan iklim.
- h. Memperkuat kerja sama maritim di kawasan Pasifik dan Oseania serta pada forum regional dan sub-regional untuk mendukung penguatan ekonomi biru (*blue economy*), perlindungan sumber daya laut, konektivitas, serta peningkatan kapasitas.
 - i. Melakukan pembahasan secara intensif terkait perluasan akses dan penetrasi dagang Indonesia dengan negara-negara potensial non-tradisional di kawasan Pasifik dan Oseania.
 - j. Mendorong pemanfaatan instrumen kebijakan ekonomi negara-negara di kawasan Pasifik dan Oseania guna mendukung kepentingan Indonesia, terutama pada proyek strategis nasional, perluasan basis produksi industri manufaktur, hilirisasi, dan penguatan ketahanan pangan.
 - k. Berpartisipasi aktif dalam pembahasan, finalisasi, dan implementasi *Grand Design* Diplomasi Ekonomi;
 - l. Berpartisipasi aktif dalam pembahasan, finalisasi, dan implementasi *Grand Design* Strategi Kebijakan Indonesia di Kawasan Pasifik (*Pacific Elevation*);
 - m. Memperkuat kerja sama terkait ketahanan pangan, energi dan air dengan negara-negara mitra di kawasan Pasifik dan Oseania,
 - n. Mendorong solusi iklim yang adil dan inklusif melalui kerja sama regional, dan kemitraan lainnya di kawasan Pasifik dan Oseania.
 - o. Berkoordinasi dengan perwakilan RI di kawasan Pasifik dan Oseania terkait pemanfaatan dashboard Investolink dan pengembangan Sistem Informasi Diplomasi Ekonomi (SIDE) dalam mendukung upaya penguatan diplomasi ekonomi.
2. Arah kebijakan peningkatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan Pasifik dan Oseania sebagai kekuatan positif, aktor kunci, dan bagian dari solusi yang berkontribusi terhadap stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran kawasan dan dunia memiliki strategi sebagai berikut:
- a. Meningkatkan peran aktif dan kepemimpinan Indonesia di kawasan Pasifik dan Oseania di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
 - b. Melanjutkan peran aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral, regional, maupun multilateral sesuai dengan amanat konstitusi.
 - c. Memperkuat kerja sama di forum regional dan sub-regional di kawasan Pasifik dan Oseania terkait isu yang menjadi kepentingan bersama.
 - d. Mengoptimalkan keanggotaan Indonesia pada berbagai forum di kawasan Pasifik dan Oseania, untuk menyuarakan dan mendorong inisiatif-inisiatif baru yang makin mengakomodasi kepentingan nasional dan kepentingan *Global South*.
 - e. Meningkatkan kerja sama dan *trust-building* di kawasan Pasifik dan Oseania yang terfokus pada pengembangan kerja sama kemaritiman, konektivitas dan infrastruktur, serta pembangunan.

- f. Melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan di dalam negeri dalam memanfaatkan implementasi *Invested: Australia's Southeast Asia Economic Strategy to 2040*, khususnya untuk sektor-sektor prioritas, yakni ketahanan pangan, transisi energi berkelanjutan, dan pembangunan *Joint Ventures*, pertukaran pengetahuan.
 - g. Menegaskan kepemimpinan Indonesia melalui optimalisasi pemanfaatan peran Indonesia sebagai ketua dan/atau tuan rumah pertemuan serta pusat koordinasi kerja sama regional dan internasional yang berlokasi di Indonesia.
 - h. Meningkatkan kemitraan dengan akademisi dan lembaga *think tank* dari Indonesia maupun negara-negara mitra di kawasan Pasifik dan Oseania dan mendorong peran dan kontribusinya dalam perumusan strategi kebijakan nasional terkait kerja sama di berbagai kawasan, serta isu khusus.
 - i. Melaksanakan survei dan penyusunan *foresight* untuk mempersiapkan strategi kebijakan dalam menghadapi tantangan global dan regional ke depan, termasuk trend-trend global.
3. Arah kebijakan penguatan postur diplomasi guna meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia melalui tata kelola organisasi yang baik di lingkungan Direktorat Pasifik dan Oseania memiliki strategi sebagai berikut:
 - a. Memperkuat kapasitas sumber daya diplomasi Direktorat Pasifik dan Oseania.
 - b. Melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam negeri terkait secara berkala.
 - c. Memanfaatkan dan melakukan inovasi terkait penguatan infrastruktur digital di lingkungan Direktorat Pasifik dan Oseania.
 - e. Mendukung penguatan kapasitas SDM berperspektif gender dan membentuk tim penggerak PUG di Direktorat Pasifik dan Oseania.

3.3 Mitigasi Risiko

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi dimaksud, Direktorat Pasifik dan Oseania memetakan risiko yang perlu dilakukan mitigasi dengan mempertimbangkan analisis SWOT Direktorat Pasifik dan Oseania.

Tabel 2. Daftar Mitigasi Risiko Direktorat Pasifik dan Oseania

Risiko Politik	Probabilitas	Dampak	Konsekuensi	Mitigasi
Sikap tegas Indonesia dalam isu-isu tertentu	Sedang	Sedang - Besar	a. Tertundanya pencapaian konsensus dalam forum multilateral.	a. Penguatan aliansi Indonesia dengan negara-negara <i>like-minded</i> .

menjadi hambatan dalam proses negosiasi dan pencapaian konsensus dalam forum multilateral			b. Berkurangnya ruang diplomasi Indonesia dalam forum tertentu.	b. Pendekatan bilateral dengan negara-negara oposisi dengan semangat <i>bridge-building</i> .
Perbedaan kepentingan antara internal dengan mitra terkait	Sedang	Besar	Terhambatnya Tindak Lanjut Kesepakatan	a. Meningkatkan komunikasi internal antar K/L dan mitra. b. Menyusun forum koordinasi rutin.
Ketidakpastian kebijakan domestik	Tinggi	Besar	Ketidakstabilan dalam hubungan internasional	a. Memperkuat analisis kebijakan dan proyeksi jangka panjang. b. Memfasilitasi dialog kebijakan dengan pemangku kepentingan.
Instabilitas politik di negara mitra	Sedang	Besar	Proses penyusunan kesepakatan dan kelangsungan kerja sama bilateral dapat terdampak	a. Menjalin hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan di negara mitra. b. Memantau perkembangan politik secara berkala.
Risiko Eksternal	Probabilitas	Dampak	Konsekuensi	Mitigasi
Krisis geopolitik berkelanjutan yang memicu krisis ekonomi dan instabilitas finansial	Sedang	Besar	a. Disrupsi upaya diplomasi ekonomi. b. Posisi Indonesia yang dirugikan dalam rantai pasok dan	Diversifikasi mitra dagang dan komoditas

			perdagangan global.	
Perubahan prioritas dan kebijakan negara mitra yang berdampak pada kelangsungan kerja sama atau pembahasan isu strategis yang sedang berlangsung.	Sedang	Sedang - Besar	Proyek/inisiatif/pe mbahasan isu strategis mengalami penundaan signifikan, terhenti, atau dibatalkan.	Mengintensifkan dialog secara teratur untuk memahami potensi perubahan kebijakan negara mitra.
Hambatan perdagangan (tarif/non-tarif)	Tinggi	Sedang	Penurunan daya saing produk	a. Melakukan negosiasi untuk pengurangan tarif. b. Meningkatkan promosi produk di pasar internasional.
Risiko Pemangku Kepentingan	Probabilitas	Dampak	Konsekuensi	Mitigasi
Antusiasme konstituen <i>Grand Design</i> yang dibangun oleh Kemenlu belum optimal (a.l. MILN, masy. Pasifik)	Rendah	Sedang	Tidak terealisasinya berbagai potensi diplomasi RI	a. Pemetaan <i>quick wins</i> dan manfaat (a.l. penyediaan hibah, fasilitas) untuk menunjukkan komitmen nyata Indonesia. b. Penyusunan narasi integrasi dengan agenda regional/global yang lebih besar (a.l. SDGs, Paris Agreement). c. <i>Engagement</i> dengan konstituen

				sejak awal penyusunan <i>Grand Design</i> guna menumbuhkan <i>sense of ownership</i> .
Tingkat pemahaman pemangku kepentingan tentang potensi kerja sama yang belum optimal sehingga berpengaruh pada rendahnya partisipasi publik	Sedang	Sedang	a. Tidak teridentifikasinya peluang kerja sama secara komprehensif dan mendalam. b. Kurangnya legitimasi dan dukungan publik	a. Mengadakan diseminasi berupa forum publik, jaring masukan, dialog terbuka, workshop atau seminar untuk menyebarluaskan informasi potensi kerja sama luar negeri. b. Memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi. c. Menyediakan laporan dan analisis pasar yang mudah diakses.
Belum optimalnya tindak lanjut <i>Data Economic Intelligence</i> oleh pemangku kepentingan dalam negeri.	Sedang	Sedang	Bahan kajian yang kurang mendalam dan tidak sesuai dengan sasaran	a. Melakukan pengolahan DEI terkait potensi kerja sama luar negeri. b. Melakukan diseminasi untuk menyebarluaskan potensi kerja sama luar negeri kepada pemangku kepentingan dalam negeri.
Risiko Administratif	Probabilitas	Dampak	Konsekuensi	Mitigasi
Pergantian pejabat dalam tim perundingan	Tinggi	Sedang	a. Terhambatnya efektivitas dan kesinambungan perundingan	a. Persiapan sistem manajemen pengetahuan dan arsip diplomatik

kesepakatan sehubungan dengan panjangnya periode negosiasi			kesepakatan. b. Melemahnya posisi tawar Indonesia terhadap negara mitra	digital untuk <i>institutional knowledge</i> . b. Penyesuaian prosedur internal seperti rotasi terbatas (<i>buffer time</i>) untuk pejabat kunci dalam perundingan strategis.
Rendahnya partisipasi dan representasi Indonesia dalam pertemuan dan sidang regional maupun multilateral karena terbatasnya sumber daya (manusia dan anggaran).	Tinggi	Besar	a. Hilangnya peluang untuk menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama yang penting. b. Kehilangan pengaruh / kesempatan dalam pengambilan keputusan di forum internasional dan regional.	a. Mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efisien. b. Menentukan skala prioritas pertemuan bagi kepentingan nasional untuk dapat memastikan partisipasi dan representasi yang memadai.
Penyelenggaraan pertemuan mekanisme bilateral yang sangat tergantung pada kesediaan jadwal pejabat tinggi pada tingkat yang disepakati.	Tinggi	Sedang	Ketidakpastian tentang penjadwalan pertemuan dapat mempengaruhi perencanaan kerja sama bilateral.	a. Melakukan pendekatan dengan mitra untuk mencari kemungkinan alternatif pejabat untuk pertemuan mekanisme bilateral. b. Memanfaatkan teknologi komunikasi untuk pertemuan virtual sebagai alternatif ketika jadwal fisik tidak memungkinkan.
Risiko Anggaran	Probabilitas	Dampak	Konsekuensi	Mitigasi

Penurunan atau efisiensi pagu anggaran Kementerian Luar Negeri yang berdampak pada Direktorat Pasifik dan Oseania	Tinggi	Besar	Berkurangnya kapasitas fiskal untuk kegiatan pelaksanaan tugas Direktorat Pasifik dan Oseania dan kemampuan untuk memenuhi target tahunan	Penyiapan <i>contingency plan</i> dengan anggaran minimal/pasca efisiensi sejak awal tahun anggaran, dengan skenario yang masih dapat mempertahankan target unit organisasi
Rendahnya realisasi anggaran	Sedang	Besar	Ketidakoptimalan penggunaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan	a. Mengatur penjadwalan kegiatan dengan cermat agar tidak terpusat di akhir tahun. b. Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran secara berkala.
Perubahan target kinerja	Sedang	Sedang	Pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan target kinerja	a. Menyusun rencana dan kegiatan alternatif untuk penyesuaian target. b. Melakukan pemantauan berkala terkait penyesuaian target.

3.4 Kerangka Regulasi

Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Direktorat Pasifik dan Oseania telah diatur dalam Permenlu No. 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis periode 2025 – 2029, Direktorat Pasifik dan Oseania memerlukan arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi, sebagai berikut:

1. Rancangan UU Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
2. Rancangan UU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
3. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pemberian Hibah
4. Rancangan Peraturan Presiden Grand Design Diplomasi Ekonomi
5. Rancangan Peraturan Presiden Grand Design Strategi Kebijakan Indonesia di kawasan Pasifik (*Pacific Elevation*)
6. Rancangan Peraturan Presiden tentang Grand Design Strategi Kerja Sama Pembangunan Internasional
7. Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing
8. Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri
9. Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia
10. Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perencanaan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing atau Lembaga Asing
11. Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI
12. Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kemenlu dan Perwakilan RI
13. Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Kelola Berita Diplomatik dalam Hubungan Luar Negeri
14. Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia
15. Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI
16. Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI
17. Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pedoman Kebutuhan Jabatan Fungsional
18. Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri

3.5 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Direktorat Pasifik dan Oseania periode 2025 – 2029 diarahkan untuk mendukung fungsi Kementerian Luar Negeri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeri, serta melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pasifik dan Oseania terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Direktorat Pasifik dan Oseania perlu didukung oleh kerangka organisasi, tata laksana/proses bisnis, dan SDM yang kompeten, efektif, inovatif, dan adaptif. Dengan perubahan lingkungan internal maupun eksternal serta peningkatan tuntutan publik, hal tersebut perlu dilengkapi dengan monitoring, evaluasi, dan penataan dalam lingkup organisasi, tata laksana, dan SDM aparatur yang berkelanjutan.

3.5.1 Peran Strategis Direktorat Pasifik dan Oseania

Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 tahun 2025 mengatur tugas Direktorat Pasifik dan Oseania dalam hal melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral di kawasan Pasifik dan Oseania.

Direktorat Pasifik dan Oseania berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dan dipimpin oleh Direktur.

3.5.2 Fungsi Direktorat Pasifik dan Oseania

Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Direktorat Pasifik dan Oseania menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral di kawasan Pasifik dan Oseania;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral di kawasan Pasifik dan Oseania;
3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral di kawasan Pasifik dan Oseania;
4. Perundingan dan tindak lanjut hasil perundingan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral di kawasan Pasifik dan Oseania;

5. Pemberian panduan substantif dan fasilitasi kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral di kawasan Pasifik dan Oseania;
6. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan bilateral di kawasan Pasifik dan Oseania; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

3.5.3 Struktur Organisasi Direktorat Pasifik dan Oseania

Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 tahun 2025, Direktorat Pasifik dan Oseania terdiri atas Subbagian Tata Usaha, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana.

3.5.4 Evaluasi Kelembagaan dan Penyederhanaan Birokrasi

Kementerian Luar Negeri telah melakukan evaluasi kelembagaan pada tahun 2022, serta evaluasi penyederhanaan struktur organisasi yang dilaksanakan setiap tahun. Sesuai dengan hasil evaluasi kelembagaan, Kementerian Luar Negeri mendapatkan peringkat P5 yang mencerminkan bahwa dari segi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan organisasi yang ada dinilai memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Kementerian Luar Negeri telah menyederhanakan 697 struktur organisasi dalam Permenlu 2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri menjadi 493 struktur organisasi melalui Permenlu 6/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. Guna memperkuat desain organisasi berbasis fungsional, dan sesuai arahan Presiden untuk menyederhanakan birokrasi, Kementerian Luar Negeri melakukan pengalihan unit organisasi eselon III dan IV menjadi berbasis fungsional secara bertahap. Penyederhanaan birokrasi sebagian besar dilakukan pada unit teknis yakni dengan menghapus struktur jabatan administrator dan pengawas (eselon III dan IV) pada Direktorat dan Pusat, termasuk Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika.

Penyederhanaan birokrasi khususnya di tingkat Pusat juga memperhatikan pertimbangan khusus, antara lain dengan pimpinan unit kerja dengan kewenangan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pejabat manajerial yang membawahi beberapa rumpun jabatan, memegang kerahasiaan data dan informasi untuk kepentingan khusus, ketatausahaan pimpinan, serta menyesuaikan dengan standar dan kebiasaan internasional. Penyederhanaan birokrasi melalui optimalisasi jabatan fungsional bertujuan untuk percepatan

pelayanan kepada stakeholders, mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan agile, serta peningkatan profesionalisme ASN.

BAB IV | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT ORGANISASI

4.1 Target Kinerja

Direktorat Pasifik dan Oseania telah menentukan 5 (lima) Sasaran Program yang merupakan cerminan dari sasaran strategis Kementerian Luar Negeri. Sasaran strategis ini hasil pencapaian program Direktorat Pasifik dan Oseania yang turut berkontribusi pada capaian program dan sasaran strategis Kementerian Luar Negeri. Sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya dari tahun ke tahun.

**Tabel 3. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Direktorat Pasifik dan Oseania Periode 2025-2029**

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Satuan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	SP: Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di Kawasan Pasifik dan Oseania						
	IK : Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	81	81,50	82	82,50	83	Indeks
2	SP: Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan						
	IK : Persentase Kesepakatan Kerja Sama Bilateral di Kawasan Asia	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

	Pasifik dan Afrika yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholders</i> Dalam Negeri						
	IK : Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum regional di Kawasan Pasifik dan Oseania yang ditindaklanjuti oleh pemegang kepentingan dalam negeri	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
3	SP: Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika						
	IK : Persentase Kesepakatan Bilateral yang Dihasilkan di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	97,45 %	97,55 %	97,75 %	98%	98,15 %	Persentase
	IK : Persentase Data Economic Intelligence dari Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholders</i> Dalam Negeri	98,53 %	98,53 %	99%	99%	100%	Persentase
4	SP: Diplomasi Regional yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika						
	IK : Persentase Gagasan/ Prakarsa/ Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Regional di Kawasan Pasifik dan Oseania	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
5	SP: Tata Kelola Organisasi Direktorat Pasifik dan Oseania yang Baik						
	IK : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Pasifik dan Oseania	77,40 (BB)	77,45 (BB)	77,50 (BB)	77,55 (BB)	77,60 (BB)	Nilai

4.2 Kerangka Pendanaan

Pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan perlu didukung dengan berbagai sumber daya baik dukungan sumber daya manusia, prasarana yang memadai, dukungan regulasi serta sumber pendanaan.

Direktorat Pasifik dan Oseania mengampu 1 (satu) program, yakni Program Diplomasi dan Kerja Sama Internasional. Dukungan pendanaan dan proyeksi

kebutuhan anggaran Direktorat Pasifik dan Oseania untuk mencapai tujuan dan sasaran periode 2025 – 2029 terdapat dalam tabel berikut.

**Tabel 4. Proyeksi Kebutuhan Anggaran Direktorat Pasifik dan Oseania
Periode 2025-2029**

No	Program / Rincian Output	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Diplomasi dan Kerja Sama Internasional						
1	Kerja Sama di Kawasan Pasifik dan Oseania	4.500.000.000	5.160.074.000	5.310.000.000	6.265.800.000	7.393.644.000
2	Prakarsa/Rekomendasi Indonesia pada Forum Kerja Sama Regional di Kawasan Pasifik dan Oseania	2.750.000.000	1.409.927.000	3.245.000.000	3.829.100.000	4.518.338.000
	Total	7.250.000.000	6.570.001.000	8.555.000.000	10.094.900.000	11.911.982.000

BAB V | PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Pasifik dan Oseania periode 2025–2029 merupakan landasan fundamental untuk mengarahkan pelaksanaan diplomasi dan kerja sama internasional Indonesia di kawasan Pasifik dan Oseania guna mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Kawasan Pasifik dan Oseania memiliki posisi strategis namun penuh tantangan, mulai dari instabilitas geopolitik, krisis energi dan pangan, hingga disrupsi teknologi. Menghadapi kondisi ini, Direktorat Pasifik dan Oseania memfokuskan penguatan diplomasi di tengah dinamika situasi global melalui kerja sama di sektor prioritas untuk mewujudkan Asta Cita, penjagaan kedaulatan, dan peningkatan peran kepemimpinan Indonesia.

Pacific Elevation sebagai upaya strategis dalam meningkatkan *engagement*, peran kepemimpinan dan kerja sama Indonesia yang lebih mendalam di kawasan Pasifik. Solidaritas Global South yang diwariskan dari Konferensi Asia-Afrika (KAA) akan menjadi daya tawar yang relevan dan krusial, khususnya untuk membangun kemitraan yang seimbang dan mengoptimalkan kerja sama di forum regional, termasuk di sub-kawasan Pasifik, dan Afrika. Keberhasilan diplomasi Indonesia di periode mendatang akan semakin menegaskan konsistensi kepemimpinan serta peran konstruktif Indonesia dalam kemajuan berbagai sektor kerja sama di kawasan kunci ini. Penguatan diplomasi untuk menghadapi tantangan perlu lebih cermat dalam memanfaatkan peluang yang tersedia dengan optimalisasi modalitas yang dimiliki.

Dengan implementasi Rencana Strategis 2025–2029 yang terukur dan berpegang teguh pada visi yang ditetapkan, Direktorat Pasifik dan Oseania optimis dapat memantapkan ketangguhan dan relevansi diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik dan Oseania. Direktorat Pasifik dan Oseania berkomitmen penuh untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan landasan akuntabilitas, profesionalisme, dan orientasi hasil demi tercapainya pembangunan nasional yang berkesinambungan, dan pada akhirnya, mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Strategi Direktorat Pasifik dan Oseania tahun 2025-2029

No.	Strategi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	No.	Strategi Direktorat Pasifik dan Oseania
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mendorong transformasi pertanian Indonesia, termasuk penguatan swasembada pangan, melalui kerja sama internasional di bidang teknologi pertanian, riset agrikultur, dan pembukaan akses pasar global bagi komoditas pertanian unggulan	1	Memperkuat kerja sama di bidang teknologi pertanian, riset agrikultur, dan pembukaan akses pasar global bagi komoditas pertanian unggulan, termasuk melalui penandatanganan dan implementasi kesepakatan bilateral
2	Memperluas kemitraan strategis di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) melalui diplomasi energi, promosi investasi hijau, serta pengembangan rantai pasok global yang mendukung transisi energi nasional	2	Memperkuat kerja sama di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) melalui diplomasi energi, promosi investasi hijau, serta pengembangan rantai pasok global yang mendukung transisi energi nasional, termasuk dengan melibatkan tidak hanya unsur pemerintah, tetapi juga swasta
3	Memfasilitasi ekspansi BUMN Indonesia di pasar global melalui promosi branding BUMN <i>Go Global</i> serta dukungan dan kolaborasi dalam program promosi terpadu di luar negeri	3	Melakukan pelibatan BUMN Indonesia dalam program investasi dua arah dan pelaksanaan kerja sama pembangunan
4	Mengembangkan ekosistem startup nasional melalui kerja sama internasional di bidang inovasi digital, teknologi kecerdasan buatan, serta peningkatan mobilitas dan kapasitas talenta muda Indonesia	4	Memperkuat kerja sama di bidang inovasi digital, teknologi kecerdasan buatan, serta peningkatan mobilitas dan kapasitas talenta muda Indonesia, baik dengan memanfaatkan kerangka kerja sama yang telah ada, maupun pembuatan kerangka kerja sama baru

5	Mendorong penghapusan hambatan perdagangan terhadap produk unggulan Indonesia serta memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum-forum ekonomi internasional guna melindungi kepentingan nasional	5	Melakukan pembahasan penghapusan hambatan perdagangan terhadap produk unggulan Indonesia secara intensif dengan negara-negara mitra dagang Indonesia
6	Mengarusutamakan diplomasi ekonomi digital sebagai penggerak pertumbuhan inklusif, melalui penguatan kerja sama di bidang AI, keamanan siber, ekonomi kreatif, dan transformasi digital lintas negara	6	Memperkuat kerja sama di bidang AI, keamanan siber, ekonomi kreatif, dan transformasi digital lintas negara, melalui implementasi kesepakatan yang telah ada dan penandatanganan kesepakatan baru
7	Menggalang dukungan internasional bagi pembangunan hijau di Indonesia melalui optimalisasi akses terhadap pendanaan iklim, promosi investasi hijau, dan diplomasi pembangunan berkelanjutan yang berbasis prinsip keadilan iklim	7	Menggalang dukungan negara-negara mitra di kawasan Pasifik dan Oseania, terutama terkait optimalisasi akses terhadap pendanaan iklim, promosi investasi hijau, dan diplomasi pembangunan berkelanjutan yang berbasis prinsip keadilan iklim
8	Memperkuat kerja sama maritim di kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta pada forum global untuk mendukung penguatan ekonomi biru (<i>blue economy</i>), perlindungan sumber daya laut, konektivitas, serta peningkatan kapasitas	8	Memperkuat kerja sama maritim di kawasan Pasifik dan Oseania serta pada forum regional dan sub-regional untuk mendukung penguatan ekonomi biru (<i>blue economy</i>), perlindungan sumber daya laut, konektivitas, serta peningkatan kapasitas
9	Mendorong perluasan akses dan penetrasi dagang Indonesia dengan negara-negara potensial non-tradisional guna mengantisipasi fluktuasi perdagangan eksisting, terutama negara besar	9	Melakukan pembahasan secara intensif terkait perluasan akses dan penetrasi dagang Indonesia dengan negara-negara potensial non-tradisional di kawasan Pasifik dan Oseania
10	Mendorong pemanfaatan instrumen kebijakan ekonomi negara/wilayah akreditasi untuk kepentingan Indonesia, terutama pada proyek strategis nasional, perluasan basis produksi industri manufaktur, hilirisasi, dan penguatan ketahanan pangan	10	Mendorong pemanfaatan instrumen kebijakan ekonomi negara-negara di kawasan Pasifik dan Oseania guna mendukung kepentingan Indonesia, terutama pada proyek strategis nasional, perluasan basis produksi industri manufaktur, hilirisasi, dan penguatan ketahanan pangan
11	Mendorong finalisasi <i>Grand Design</i> Diplomasi Ekonomi	11	Berpartisipasi aktif dalam pembahasan, finalisasi, dan implementasi <i>Grand Design</i> Diplomasi Ekonomi

12	Mendorong finalisasi Grand Design Strategi Kebijakan Indonesia di Kawasan Pasifik (<i>Pacific Elevation</i>)	12	Berpartisipasi aktif dalam pembahasan, finalisasi, dan implementasi Grand Design Strategi Kebijakan Indonesia di Kawasan Pasifik (<i>Pacific Elevation</i>)
13	Memperkuat strategi kebijakan luar negeri yang mendukung Asta Cita, seperti isu ketahanan pangan, energi dan air	13	Memperkuat kerja sama terkait ketahanan pangan, energi dan air dengan negara-negara mitra di kawasan Pasifik dan Oseania
14	Mendorong solusi iklim yang adil dan inklusif melalui UNFCCC, kerja sama regional, dan kemitraan lainnya	14	Mendorong solusi iklim yang adil dan inklusif melalui kerja sama regional, dan kemitraan lainnya di kawasan Pasifik dan Oseania
15	Mendorong Pemanfaatan dashboard Investolink dan pengembangan Sistem Informasi Diplomasi Ekonomi (SIDE) dalam mendukung upaya penguatan diplomasi ekonomi	15	Berkoordinasi dengan perwakilan RI di kawasan Pasifik dan Oseania terkait pemanfaatan dashboard Investolink dan pengembangan Sistem Informasi Diplomasi Ekonomi (SIDE) dalam mendukung upaya penguatan diplomasi ekonomi
16	Meningkatkan peran aktif dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan prinsip politik luar negeri bebas aktif	16	Meningkatkan peran aktif dan kepemimpinan Indonesia di kawasan Pasifik dan Oseania di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan prinsip politik luar negeri bebas aktif
17	Melanjutkan peran aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral, regional, maupun multilateral sesuai dengan amanat konstitusi, serta memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina	17	Melanjutkan peran aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral, regional, maupun multilateral sesuai dengan amanat konstitusi
18	Memperkuat kerja sama multilateral dan regional dalam isu-isu terkait perdamaian dan keamanan internasional, hak asasi manusia, migrasi, kebencanaan, demokrasi, kerja sama ekonomi strategis, pembangunan berkelanjutan, kemaritiman, lingkungan hidup, serta kemitraan strategis, kesehatan global, kependudukan, pendidikan,	18	Memperkuat kerja sama di forum regional dan sub-regional di kawasan Pasifik dan Oseania terkait isu yang menjadi kepentingan bersama

	kebudayaan, ketenagakerjaan, pariwisata, kerja sama parlemen, dan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai badan utama dan subsider PBB serta forum kerja sama multilateral dan regional lainnya yang menguntungkan kepentingan nasional		
19	Mengoptimalkan keanggotaan Indonesia pada pelbagai forum internasional dan kawasan, untuk menyuarakan dan mendorong inisiatif-inisiatif baru yang makin mengakomodasi kepentingan nasional dan kepentingan <i>Global South</i>	19	Mengoptimalkan keanggotaan Indonesia pada berbagai forum di kawasan Pasifik dan Oseania, untuk menyuarakan dan mendorong inisiatif-inisiatif baru yang makin mengakomodasi kepentingan nasional dan kepentingan <i>Global South</i>
20	Mendorong penyelesaian damai dan berkelanjutan atas krisis Myanmar melalui fasilitasi dialog inklusif, penguatan peran ASEAN, serta kerja sama regional dan internasional guna mewujudkan stabilitas dan perdamaian kawasan	20	-
21	Meningkatkan peran Indonesia baik melalui mekanisme bilateral maupun ASEAN dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar guna tercapainya repatriasi yang aman, sukarela, dan bermartabat bagi para pengungsi serta mendorong terciptanya stabilitas keamanan di Rakhine State	21	-
22	Meningkatkan kerja sama dan <i>trust-building</i> di kawasan Indo-Pasifik yang terfokus pada pengembangan kerja sama kemaritiman, konektivitas dan infrastruktur, serta pembangunan	22	Meningkatkan kerja sama dan <i>trust-building</i> di kawasan Pasifik dan Oseania yang terfokus pada pengembangan kerja sama kemaritiman, konektivitas dan infrastruktur, serta pembangunan
23	Menunjukkan kepemimpinan Indonesia selaku koordinator kemitraan ASEAN-Australia periode 2024-2027 melalui 4 (empat) prioritas utama sebagaimana disampaikan pada 57th AMM/PMC pada Juli 2024, dalam bidang politik (terkait pencegahan konflik dan	23	-

	pengelolaan krisis; kerja sama maritim; mendorong transparansi dan non-proliferasi di kawasan), dalam bidang ekonomi (terkait ketahanan pangan; transisi energi yang berkeadilan; serta implementasi efektif <i>ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area</i> (AANZFTA) dan RCEP), dalam bidang sosial budaya (terkait pemanfaatan <i>ASEAN-Australia Centre</i>), dan dalam Implementasi AOIP (dengan memanfaatkan kemitraan ASEAN-Australia sebagai sarana dalam meningkatkan engagement dengan <i>Pacific Island Forum</i> (PIF), <i>Melanesian Spearhead Group</i> (MSG) dan <i>Indian Ocean Rim Association</i> (IORA)		
24	Mendorong pemanfaatan upaya Australia dalam meningkatkan investasi dan perdagangan dua arah di kawasan Asia Tenggara dan untuk mengakomodasi kepentingan Indonesia dalam bidang ketahanan pangan, transisi energi berkelanjutan, dan pembangunan <i>Joint Ventures</i> , pertukaran pengetahuan, serta fasilitas pendanaan di sektor-sektor prioritas melalui implementasi <i>Invested: Australia's Southeast Asia Economic Strategy to 2040</i>	24	Melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan di dalam negeri dalam memanfaatkan implementasi <i>Invested: Australia's Southeast Asia Economic Strategy to 2040</i> , khususnya untuk sektor-sektor prioritas, yakni ketahanan pangan, transisi energi berkelanjutan, dan pembangunan <i>Joint Ventures</i> , pertukaran pengetahuan
25	Mendorong keterwakilan Indonesia dan atau Warga Negara Indonesia untuk menduduki posisi-posisi strategis di organisasi internasional guna memastikan pengaruh dan kepemimpinan Indonesia dalam proses penyusunan norma dan atau kebijakan organisasi internasional	25	-
26	Menegaskan kepemimpinan Indonesia melalui optimalisasi pemanfaatan peran Indonesia sebagai ketua dan/atau tuan rumah pertemuan serta pusat koordinasi kerja sama regional dan internasional yang	26	Menegaskan kepemimpinan Indonesia melalui optimalisasi pemanfaatan peran Indonesia sebagai ketua dan/atau tuan rumah pertemuan serta pusat koordinasi

	berlokasi di Indonesia. Memperkuat dialog perumusan kebijakan luar negeri (di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) melalui <i>Policy Planning Dialogue</i> dengan mitra strategis		kerja sama regional dan internasional yang berlokasi di Indonesia
27	Meningkatkan kemitraan dengan akademisi dan lembaga think tank dan mendorong peran dan kontribusinya dalam perumusan strategi kebijakan nasional terkait kerja sama di berbagai Kawasan dan forum multilateral, serta isu khusus	27	Meningkatkan kemitraan dengan akademisi dan lembaga <i>think tank</i> dari Indonesia maupun negara-negara mitra di kawasan Pasifik dan Oseania dan mendorong peran dan kontribusinya dalam perumusan strategi kebijakan nasional terkait kerja sama di berbagai kawasan, serta isu khusus
28	Melaksanakan survei dan penyusunan <i>foresight</i> untuk mempersiapkan strategi kebijakan dalam menghadapi tantangan global dan regional ke depan, termasuk trend-trend global. Mendorong Kemitraan antara Parlemen dan Pemerintah dan antar-Parlemen Negara Anggota Asian Parliamentary Assembly	28	Melaksanakan survei dan penyusunan <i>foresight</i> untuk mempersiapkan strategi kebijakan dalam menghadapi tantangan global dan regional ke depan, termasuk trend-trend global
29	Memperkuat postur dan sumber daya diplomasi dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan/ penyelenggaraan kebijakan luar negeri	29	Memperkuat kapasitas sumber daya diplomasi Direktorat Pasifik dan Oseania
30	Memperkuat kinerja koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia melalui pengembangan kemampuan komponen postur diplomasi	30	Melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam negeri terkait secara berkala
31	Memperkuat strategi transformasi digital sebagai upaya penguatan <i>diplomatic tools</i> Kemlu	31	Memanfaatkan dan melakukan inovasi terkait penguatan infrastruktur digital di lingkungan Direktorat Pasifik dan Oseania
32	Mendukung penguatan kapasitas SDM berperspektif gender dan membentuk tim penggerak PUG lintas unit	32	Mendukung penguatan kapasitas SDM berperspektif gender dan membentuk tim penggerak PUG di Direktorat Pasifik dan Oseania

Lampiran 2: Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Pasifik dan Oseania 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (Juta Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Diplomasi dan Kerja Sama Internasional	Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di Kawasan Pasifik dan Oseania	Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	81	81,50	82	82,50	83	7.250	6.570	8.555	10.094	11.911
	Dukungan dan Komitmen Nasional atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional yang Tinggi di Kawasan	Persentase Kesepakatan Kerja Sama Bilateral di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholders</i> Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase prakarsa/rekomenda si pada forum regional di Kawasan Pasifik dan Oseania yang ditindaklanjuti oleh pemegang kepentingan dalam negeri	100%	100%	100%	100%	100%					

	Diplomasi Bilateral yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Persentase Kesepakatan Bilateral yang Dihasilkan di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	97,45%	97,55%	97,75%	98%	98,15%					
		Persentase Data Economic Intelligence dari Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholders</i> Dalam Negeri	98,53%	98,53%	99%	99%	100%					
	Diplomasi Regional yang Kuat di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Persentase Gagasan/ Prakarsa/ Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Regional di Kawasan Pasifik dan Oseania	100%	100%	100%	100%	100%					
	Tata Kelola Organisasi Direktorat Pasifik dan Oseania yang Baik	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Pasifik dan Oseania	77,40 (BB)	77,45 (BB)	77,50 (BB)	77,55 (BB)	77,60 (BB)					